

**EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN GOWA BERDASARKAN KEPMENDAGRI
NO. 47 TAHUN 1999**

Skripsi

Untuk memenuhi salah
satu persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Akuntansi



School Of business

Diajukan Oleh:
Ahiyarti Amiruddin
2015221746

JURUSAN PROGRAM STUDI AKUNTANSI
KONSENTRASI KORPORASI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
NOBEL INDONESIA
MAKASSAR
2019

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KABUPATEN GOWA BERDASARKAN
KEPMENDAGRI NO.47 TAHUN 1999

diajukan oleh :

Nama : AHIYARTI AMIRUDDIN

NIM : 2015221746

telah dipertahankan dihadapan tim penguji Tugas Akhir/Skripsi
STIE Nobel Indonesia pada tanggal 14 April 2019 dan dinyatakan
diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Akademik
Sarjana Akuntansi. S.Ak

Makassar, 23 Agustus 2019

Tim Penguji

Ketua : Andi Marlina, S.E., M.Ak

Sekretaris : Asbi Amin, S.E., M.Ak

Anggota : Dr. Sylvia, S.E., M.Si., Ak



1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*

Mengesahkan

Wakil Ketua I
Bidang Akademik

[Signature]

(Dr. Ahmad Firman, S.E., M.Si)

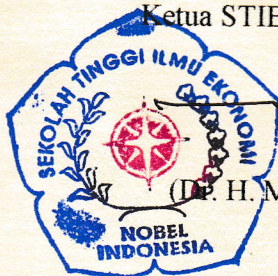
Ketua Jurusan

[Signature]

(Indrawan Azis, S.E., M.ak)

Mengetahui

Ketua STIE Nobel Indonesia Makassar



[Signature]
(D.P. H. Mashur Razak, S.E., MM)

SURAT PERNYATAAN

Nama : Ahiyarti Amiruddin
NIM : 2015221746
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Korporasi

Judul Skripsi :

Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gowa Berdasarkan Kepmendagri No.47 Tahun 1999 (Studi Kasus Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa Skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan milik orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Makassar, 08 Maret 2019

Yang menyatakan,



(Ahiyarti Amiruddin)

ABSTRAK

Ahiyarti Amiruddin. 2019. Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gowa Berdasarkan Kepmendagri No. 47 Tahun 1999, dibimbing oleh Andi Marlinah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gowa.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan ialah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan berdasarkan SK Mendagri No. 47 Tahun 1999 tentang pedoman penilaian kinerja Perusahaan Daerah Air Minum. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi dimana masing-masing aspek memiliki 10 indikator.

Berdasarkan Kepmendagri No. 47 Tahun 1999 tentang penilaian kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dari aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi pada tahun 2016 diperoleh 50.05% dengan kategori kinerja 'cukup' dan tahun 2017 diperoleh 60.2% dengan kategori kinerja 'baik'.

Kata Kunci: Kinerja PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum)

ABSTRACT

Ahiyarti Amiruddin. 2019. *Evaluation of Appraisal of Regional Water Supply Company of Gowa Regency Based on Kepmendagri No. 47 in Years 1999, supervised by Andi Marlinah.*

This research aims to determine the appraisal of the Regional Water Supply Company of Gowa Regency.

Data collection techniques used were interviews and documentation. Data analysis techniques are based on Decree of the Minister of Home Affairs No. 47 in years 1999 concerning guidelines for evaluating the performance of Regional Water Supply Companies. The data used in this research include data on financial aspects, operational aspects and administrative aspects which each aspect has 10 indicators.

Based on Decree of the Ministry of Home Affairs No. 47 in years 1999 concerning the work appraisal of Regional Water Supply Company from the financial aspects, operational aspects and administrative aspects in 2016 were obtained 50.05% with 'enough' appraisal categories and 2017 were obtained 60.2% with 'good' appraisal categories.

Keywords: *Appraisal of Regional Water Supply Company (PDAM)*

BAB III. METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis dan Sumber Data	24
3.2 Lokasi Penelitian.....	24
3.3 Subjek dan Objek Penelitian.....	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data data.....	25
3.5 Metode Analisis Data.....	25
3.6 Definisi Oprasional	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Profil Perusahaan.....	33
4.2 Pengembangan Peningkatan Palayanan kepada Masyarakat.....	36
4.3 Visi dan Misi.....	38
4.4 Kelembagaan dan Struktur Organisasi PAM.....	38
4.5 Struktur Organisasi.....	41
4.6 Pembahasan	42
4.6.1 Perhitungan dan Hasil Perhitungan Kinerja Keuangan tahun 2016-2017.....	42
4.6.2 Perhitungan dan Hasil Perhitungan Kinerja Operasional tahun 2016-2017.....	50
4.6.3 Perhitungan dan Hasil Perhitungan Kinerja Administrasi tahun 2016-2017.....	58
4.6.4 Penentuan Nilai Kinerja Aspek Keuangan, Oprasional dan Administrasi perusahaan.....	65
BAB V PENUTUP.....	69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	69
Lampiran	
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Aspek Keuangan.....	17
Tabel 2.2 Aspek Operasional.....	18
Tabel 2.3 Aspek Administrasi.....	19
Tabel 3.1 Aspek Keuangan.....	27
Tabel 3.2 Aspek Operasional.....	28
Tabel 3.3 Aspek Administrasi.....	29
Tabel 3.4 Klasifikasi Nilai	30
Tabel 3.5 Aspek Keuangan, Operasional, Administrasi.....	30
Tabel 3.6 Klasifikasi Kinerja.....	31
Tabel 4.6.1.1 Perhitungan dan Nilai Laba terhadap Aktiva Produktif.....	42
Tabel 4.6.1.2 Perhitungan dan Nilai terhadap Penjualan.....	43
Tabel 4.6.1.3 Perhitungan dan Nilai Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar.....	44
Tabel 4.6.1.4 Perhitungan dan Nilai Utang Jangka Panjang terhadap Ekuitas....	44
Tabel 4.6.1.5 Perhitungan dan Nilai Total Aktiva terhadap Nilai Uang.....	45
Tabel 4.6.1.6 Perhitungan dan Nilai Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi	46
Tabel 4.6.1.7 Perhitungan dan Nilai Laba Operasi sebelum by.Penyusutan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo.....	47
Tabel 4.6.1.8 Perhitungan dan Nilai Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air...	47
Tabel 4.6.1.9 Perhitungan dan Nilai Jangka Waktu Penagihan.....	48
Tabel 4.6.1.10 Perhitungan dan Nilai Efektifitas Penagihan.....	49
Tabel 4.6.2.1 Perhitungan dan Nilai Cakupan Pelayanan.....	50
Tabel 4.6.2.2 Nilai Kualitas Air Distribusi.....	51
Tabel 4.6.2.3 Nilai Kontinuitas Air Distribusi.....	52
Tabel 4.6.2.4 Perhitungan dan Nilai Produktifitas Pemanfaatan Instalasi Produksi	52

Tabel 4.6.2.5	Perhitungan dan Nilai Tingkat Kehilangan Air.....	53
Tabel 4.6.2.6	Perhitungan dan Nilai Peneraan Meter Air.....	54
Tabel 4.6.2.7	Nilai Penyambungan Baru.....	55
Tabel 4.6.2.8	Perhitungan dan Nilai Kemampuan Penanganan Pengaduan Rata-rata Perbulan	55
Tabel 4.6.2.9	Nilai Kemudahan Pelayanan.....	56
Tabel 4.6.2.10	Perhitungan dan Nilai Karyawan Per-1000 Pelanggan.....	57
Tabel 4.6.3.1	Nilai Rencana Jangka Panjang.....	58
Tabel 4.6.3.2	Nilai Rencana Organisasi dan Uraian Tugas.....	59
Tabel 4.6.3.3	Nilai Prosedur Operasi Standar.....	59
Tabel 4.6.3.4	Nilai Gambar Nyata Laksana.....	60
Tabel 4.6.3.5	Nilai Pedoman Penilaian Kerja Karyawan.....	61
Tabel 4.6.3.6	Nilai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.....	61
Tabel 4.6.3.7	Nilai Tertib Laporan Internal.....	62
Tabel 4.6.3.8	Nilai Tertib Laporan Eksternal.....	63
Tabel 4.6.3.9	Nilai Opini Auditor Independen.....	64
Tabel 4.6.3.10	Nilai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun Terakhir.....	65
Tabel 4.6.4.1	Nilai Analisis Penilaian Kinerja Aspek Keuangan PDAM.....	66
Tabel 4.6.4.2	Nilai Analisis Penilaian Kinerja Aspek Operasional PDAM.....	66
Tabel 4.6.4.3	Nilai Analisis Penilaian Kinerja Aspek Administrasi PDAM...	67
Tabel 4.6.4.4	Hasil Penilaian Kinerja dan Nilai Kinerja.....	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Konseptual.....	23
Gambar 2 Struktur Organisasi PDAM.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Air merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup di bumi ini termasuk manusia. Tanpa air manusia akan mengalami kesulitan untuk melangsungkan hidupnya, maka pengelolaannya harus diatur dengan bijak sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Sebagai sumber daya nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka pengelolaannya dipegang oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Perwujudan dari otonomi daerah dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah dilakukan melalui berbagai arah kebijakan, salah satunya adalah desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumber daya di daerah. Implikasi dari kebijakan ini tidak lain adalah untuk mendongkrak sumber-sumber penerimaan daerah, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Pasal 10 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa daerah berwenang untuk mengelola sumber regional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai bentuk penyerahan sebagian urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum kepada daerah, maka pelayanan air minum diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya, melalui Peraturan Daerah

pelaksanaannya diserahkan kepada sebuah instansi. Dalam hal ini instansi yang menangani adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Salah satu tujuan dibentuknya PDAM adalah mencukupi kebutuhan masyarakat akan air bersih meliputi penyediaan, pengembangan pelayanan sarana dan prasarana serta distribusi air bersih. Tujuan lainnya adalah ikut serta mengembangkan perekonomian guna menunjang pembangunan daerah dengan memperluas lapangan pekerjaan, serta mencari laba sebagai sumber utama pembiayaan bagi daerah. Maksud dari tujuan tersebut adalah bahwa PDAM sebagai salah satu BUMD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang memadai sebagai pelayan masyarakat dan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fungsi ganda sebagai *Nonprofit business* dan sekaligus *for profit business*, menyebabkan PDAM tidak bersifat *Pure nonprofit organization* melainkan bersifat *quasi profit organization*. Keadaan ini memaksa manajemen berupaya menyiapkan strategi-strategi baru yang menjadikan PDAM mampu bertahan dan berkembang. Oleh karena itu, PDAM dalam hal ini manajemen harus mengkaji ulang prinsip yang digunakan dalam menciptakan produk dan layanan yang lebih baik dan berkualitas serta pelayanan yang baik kepada pelanggan. Untuk dapat menjamin PDAM berlangsung dengan baik, maka manajemen perlu mengadakan evaluasi terhadap kinerjanya dalam aspek keuangan, operasional dan administrasinya.

PDAM Tirta Jenneberang merupakan salah satu bentuk BUMD yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan profil PDAM tahun 2018, PDAM Tirta Jenneberang menghadapi beberapa tantangan yang mempengaruhi kondisi perusahaan.

Berdasarkan profil PDAM pada situs www.pdam-makassar.com tantangan yang dihadapi PDAM saat ini antara lain :

1. PDAM Tirta Jenneberang dengan segala keterbatasan yang ada dituntut kemampuannya untuk dapat mendukung sektor penyediaan air bersih sesuai perkembangan pembangunan.
2. Dengan perkembangan penduduk yang cukup tinggi terutama di daerah perkotaan serta dengan perkembangan ekonomi yang cukup pesat, mengharuskan dikembangkannya prasarana penduduk yaitu penyediaan air bersih.
3. Cakupan pelayanan masyarakat yang menikmati air bersih masih rendah karena sistem perpipaan belum menjangkau daerah-daerah yang memerlukan pelayanan maupun daerah-daerah potensial.
4. Pesatnya perkembangan sector perumahan dan pemukiman di Kabupaten Gowa yang memerlukan dukungan air bersih.
5. Tumbuhnya kawasan-kawasan andalan dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat pula, yang kiranya juga memerlukan dukungan sektor penyediaan air bersih, sedangkan aliran air sering terhambat.

Berdasarkan profil PDAM, www.pdam-makassar.com, kendala yang dihadapi ini antara lain :

1. Banyaknya unit-unit operasional PDAM yang semuanya memakai pemompaan yang mengakibatkan tingginya biaya operasional dan pemeliharaan.
2. Tarif air minum yang berlaku masih relative rendah dibandingkan dengan tarif rata-rata operasional yaitu Rp.1000/ m^3 .
3. Tingkat kehilangan air PDAM Tirta Jene Berang masih relative tinggi.
4. Kurangnya bantuan/pendanaan investasi dari pemerintah untuk mengembangkan sistem penyediaan air bersih, sehingga mengakibatkan program pengembangan sarana tertunda karena PDAM belum mampu membiayai dan hal ini perlu dicarikan jalan pemecahannya.
5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang mampu mengelola perusahaan secara professional.

Untuk menilai kinerja PDAM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No.47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum menjadi salah satu landasan pengukuran tingkat keberhasilan PDAM. Berdasarkan keputusan tersebut indikator yang diukur terdiri dari tiga aspek, yaitu aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi.

Berkaitan dengan tantangan dan kendala yang dihadapi PDAM, maka penulis melakukan evaluasi kinerja perusahaan terhadap aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi perusahaan, dimana evaluasi ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana kinerja perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 1999.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan, permasalahan yang difokuskan pada penelitian ini adalah bagaimana kinerja PDAM Tirta Jene Berang Kabupaten Gowa Tahun 2016-2017.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja PDAM Kabupaten Gowa tahun 2016-2017 berdasarkan SK Mendagri No.47 Tahun 1999 tentang Pedoman Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang nantinya diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan dapat digunakan sebagai sarana menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang bermanfaat dalam langkah selanjutnya bagi perkembangan perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian Akuntansi Menurut “Charles T.Horngren, dan Walter T.Harrison (Horgren Harrison,2007:4) menyatakan bahwa : Akuntansi adalah sistem Informasi yang mengukut aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. sedangkan menurut Werren dkk (2005:10) menjelaskan bahwa : secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan konsidi perusahaan.

2.2 Jenis-Jenis Akuntansi

1. Akuntansi Keuangan (*Financial atau General Accounting*)

Menyangkut suatu pencatatan transaksi-transaksi suatu perusahaan dan penyusunan sebuah laporan berkala yang dimana laporan tersebut bisa memberikan informasi yang berguna bagi manajemen, para pemilik dan kreditor.

2. Pemeriksaan Akuntansi (*Auditing*)

Auditing yaitu suatu bidang yang menyangkut suatu pemeriksaan laporan-laporan keuangan yang melalui catatan akuntansi secara bebas yakni suatu laporan keuangan tersebut diperiksa mengenai kejujuran dan kebenarannya.

3. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)

Akuntansi manajemen yaitu suatu bidang akuntansi yang menggunakan baik data historis ataupun data data taksiran dalam membantu manajemen untuk merencanakan suatu operasi-operasi dimasa yang akan datang.

4. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)

Akuntansi perpajakan yaitu mencakup penyusunan sebuah laporan-laporan pajak dan pertimbangan tentang sebuah konsekuensi-konsekuensi dari transaksi-transaksi perusahaan yang akan terjadi.

5. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)

Akuntansi biaya ialah suatu bidang yang menekankan penentuan dan pemakaian biaya serta pengendalian biaya tersebut yang pada umumnya terdapat dalam suatu perusahaan industri.

6. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)

Sistem akuntansi yaitu meliputi semua tehnik, metode dan prosedur untuk mencatat dan mengolah data akuntansi dalam rangka mendapatkan pengendalian intern yang baik, yang dimana pengendalian intern adalah suatu sistem pengendalian yang didapatkan dengan adanya struktur organisasi yang memungkinkan adanya suatu pembagian tugas dan sumber daya manusia yang cakap dan praktek-praktek yangn sehat.

2.3 Fungsi Akuntansi

1. Untuk mengetahui besarnya modal yang dipunyai suatu perusahaan
2. Untuk mengetahui perkembangan nya maju mundurnya suatu perusahaan

3. Untuk sebagai dasar dalam perhitungan pajak untuk menjelaskan keadaan perusahaan sewaktu-waktu memerlukan kredit dari bank atau pihak lain
4. Sebagai Dasar untuk menentukan suatu kebijakan yang akan ditempuh
5. Untuk menarik minat investor saham jika sebuah perusahaan berbentuk perseroan terbatas.

2.4 Analisis Laporan Keuangan

Salah satu alat teknik untuk menilai kinerja suatu perusahaan seperti yang dikemukakan oleh Munawir (2000:37) adalah dengan cara menganalisis laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan yang dinamakan analisis laporan keuangan.

Riyanto (1995:327-328) menyatakan bahwa adanya analisis laporan keuangan, manajer atau pimpinan keuangan dari perusahaan dapat mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dari perusahaan, sehingga dapat diketahui hasil-hasil yang telah dicapai pada waktu yang lalu dan waktu yang sedang berjalan. selain itu dengan mengadakan analisis setiap tahun maka akan diketahui kelemahan dan kelebihan yang telah diperoleh, sehingga hasil analisis tersebut sangat berguna untuk menetapkan rencana diwaktu yang akan datang.

Laporan keuangan merupakan informasi yang dapat dipakai untuk pengambilan keputusan, mulai dari investor atau calon investor sampai dengan manajemen perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan akan memberikan informasi mengenai profitabilitas, risiko, aliran kas, yang kesemuanya akan mempengaruhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan.

Urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya adalah sebagai berikut:

1. Laporan Laba Rugi (*income statement*) merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan laba rugi ini pada akhirnya memuat informasi mengenai hasil kinerja manajemen atau hasil kegiatan operasional perusahaan, yaitu laba atau rugi bersih yang merupakan hasil dari pendapatan dan keuntungan dikurangi dengan beban dan kerugian.
2. Laporan Ekuitas Pemilik (*Statement of Owner's Equity*) adalah sebuah laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam ekuitas pemilik suatu perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan ini sering dinamakan sebagai laporan perubahan modal.
3. Neraca (*Balance Sheet*) adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas perusahaan per tanggal tertentu. Tujuan dari laporan ini adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan.
4. Laporan Arus Kas (*Statement of Cash Flows*) adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktifitas, yaitu mulai dari aktifitas operasi, aktifitas investasi, sampai pada aktifitas pendanaan/pembiayaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan arus kas menunjukkan besarnya kenaikan/penurunan bersih kas dari seluruh aktifitas selama periode

berjalan serta saldo kas yang dimiliki perusahaan sampai dengan akhir periode.

2.4.1 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan yaitu :

1. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditur, dan pemakai lainnya sekarang atau masa yang akan datang untuk membuat keputusan investasi.
2. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk pemakai eksternal untuk memperkirakan jumlah waktu, dan ketidakpastian dari penerimaan kas dari bunga dan dari penjualan atau hutang pinjaman.
3. Memberi informasi untuk menolong infestor, kreditur, dan pemakai lainnya untuk memperkirakan jumlah waktu, dan ketidakpastian aliran kas masuk bersih ke perusahaan. Berdasarkan pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan yaitu dapat memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi kewajiban, dan modal sendiri dari suatu perusahaan dan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

2.5 Perusahaan Daerah Air Minum

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu bentuk Perusahaan Daerah yang ada di setiap kabupaten/kota, badan usaha ini dibentuk oleh pemerintah daerah yang bergerak pada pengadaan, pengelolaan, dan pengembangan air bersih. Pengelolaan PDAM diserahkan sepenuhnya kepada

pemerintah daerah kabupaten/kota. Selanjutnya PDAM diharapkan berfungsi sebagai pelayan masyarakat dan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada umumnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia dalam menjalankan usahanya dibebankan tiga misi, yaitu sebagai pelayan masyarakat, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan juga sebagai agen pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 269/KPTS/1984 tanggal 8 Agustus 1984 diketahui bahwa tugas pokok PDAM adalah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana penyediaan air bersih dengan tujuan memberikan pelayanan air bersih bagi masyarakat secara adil dan merata, terus menerus sesuai dengan persyaratan higienis.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mempunyai misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan air bersih.
2. Turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dibidang penyediaan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan.
3. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Dalam rangka menjalankan misi tersebut, PDAM mempunyai fungsi ganda sebagai :

1. Fungsi ekonomi perusahaan yaitu memperoleh laba agar dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

2. Fungsi sosial yang mencakup pelayanan kebutuhan air bersih kepada masyarakat dengan tariff yang rendah agar dapat terjangkau oleh masyarakat dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat di Kabupaten Gowa.

Proporsi antara fungsi ekonomi perusahaan dengan fungsi social berbeda. Jika pada fungsi ekonomi perusahaan, proporsi yang dibebankan sebesar 75%. dikarenakan perusahaan harus memperoleh laba agar dapat memberikan kontribusinya kepada PAD. Sedangkan fungsi sosial perusahaan memberikan subsidi kepada konsumen sebesar 25%. Subsidi tersebut hanya untuk meringankan tariff yang dibebankan agar dapat terjangkau oleh konsumen.

Atas dasar fungsi penyediaan air bersih PDAM Kab.Gowa perhitungan tarif air PDAM menggunakan pola:

1. Kemampuan masyarakat.
2. Penghematan air bersih.
3. Perhiungan pemakaian air yang sesuai dengan air yang dikonsumsi oleh pelanggan untuk menutup biaya operasional dan pemeliharaan sarana.

Sesuai dengan instruksi Mendagri No. 8 tahun 1998 tentang petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Minum PDAM, prinsip-prinsip dasar yang harus di pedomani dalam penetapan tarif dasar air minum adalah :

1. Untuk pemulihan biaya, maka pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum harus mencukupi untuk membiayai semua biaya atau pengeluaran perusahaan.

2. Keterjangkauan tarif dan subsidi silang. Maksudnya tarif harus dijangkau oleh pelanggan, khususnya pelanggan rumah tangga. Subsidi silang dalam tarif air maksudnya untuk membantu pelanggan yang tidak mampu membayar tarif dan juga dengan harga dasar.\
3. Efisiensi pemakaian air, dilakukan dengan pengendalian konsumsi pemakaian air, dimana pelanggan yang memakai air melebihi kebutuhan dasar dikenakan tarif yang lebih tinggi.
4. Kesederhanaan dan transparansi, kesederhanaan tarif dimaksudkan untuk mempermudah perhitungan dan pemahaman atas komponen biaya yang diperhiungkan dalam pemulihan biaya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat kita lihat bahwa PDAM mengembangkan misi ekonomi dan misi nonekonomi. Aspek ekonomi terlihat ketika PDAM menjalankan fungsinya yaitu memperoleh keuntungan yang memadai, sebab apabila PDAM tidak memperoleh profit yang memadai, maka PDAM tidak akan mampu menjalankan fungsi publiknya secara optimal sehingga kegiatan ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan yang akhirnya akan berdampak pada pencapaian misi perusahaan.

2.6 Evaluasi Kinerja PDAM

Pengertian kinerja adalah prestasi/pencapaian kerja yang telah dilakukan manajemen atas strategi pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan

suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Evaluasi kinerja bertujuan untuk membantu manajemen PDAM dalam mendorong pencapaian tujuan secara ekonomis, efisien, efektif, memperbaiki dan meningkatkan kinerja, serta memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Evaluasi standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), yang disebut evaluasi kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), merupakan kegiatan penilaian dan pengukuran tiap-tiap aspek penilaian kinerja sehingga dapat diketahui kualitas dan capaian kinerja PDAM dalam memberikan pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat. Evaluasi kinerja PDAM juga merupakan salah satu upaya untuk melihat dan sekaligus mengukur tingkat kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan, sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan PDAM yang bersangkutan. Untuk mendapatkan hasil evaluasi kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan, evaluasi kinerja PDAM dilakukan dengan menghitung capaian kinerja berdasarkan laporan keuangan PDAM yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) serta laporan audit kinerja yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bagi PDAM yang laporan keuangannya belum diaudit oleh KAP, tetap dapat dilakukan evaluasi kinerja dengan menggunakan data yang ada di laporan keuangan internal PDAM dan diberikan catatan “laporan keuangan belum diaudit (unaudited)”. Sedangkan PDAM yang kinerjanya belum diaudit oleh BPKP diberi catatan kaki “Hasil Evaluasi BPPSPAM”.

2.6.1 Penilaian Kinerja Menurut Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999

Indikator Kinerja yang dipakai yaitu menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tanggal 31 Mei 1999 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, dengan kriteria sebagai berikut:

Pengukuran kinerja ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan perusahaan dalam menjalankan operasinya, sehingga dapat diketahui keberhasilan PDAM tersebut dalam bentuk kategori kinerja yang sangat baik, baik, cukup, kurang atau tidak baik. Pengukuran kinerja PDAM menurut Kepmendagri No. 47 tahun 1999 meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek operasional, keuangan dan administrasi. Ketiga aspek tersebut memiliki indikator Pengukuran masing-masing.

1. Aspek Keuangan

Aspek keuangan terdiri dari beberapa rasio yaitu rasio laba terhadap aktiva produktif, rasio laba terhadap penjualan, rasio aktiva lancar terhadap utang lancar (*Likuiditas*), rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*), rasio total aktiva terhadap total utang (*Operating ratio*), rasio laba operasi sebelum biaya penyusutan terhadap angsuran pokok dan bunga jatuh tempo, rasio aktiva produktif terhadap penjualan air, jangka waktu penagih piutang, efektifitas penagih.

Nilai Indikator Kinerja Aspek Keuangan berdasarkan Kepmendagri No.47 Tahun 1999 memiliki sepuluh aspek atau criteria penilaian yang masing-masing memiliki indikator penilaian seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.1.

2. Aspek Operasional

Aspek operasional terdiri dari beberapa rasio yaitu :

Cakupan pelayanan, kualitas air distribusi, kontinuitas air, produktivitas pemanfaatan instalasi produksi, kehilangan air, peneraan meter air, kecepatan penyambungan baru, kemampuan penanganan pengaduan rata-rata perbulan, kemudahan pelayanan, rasio keryawan per 1000 pelanggan.

Nilai Indikator Kinerja Aspek Operasional berdasarkan Kepmendagri No.47 Tahun 1999 memiliki sepuluh aspek atau criteria penilaian yang masing-masing memiliki indikator penilaian seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.2.

3. Aspek Administrasi

Aspek Administrasi terdiri dari beberapa rasio yaitu :

Rencana jangka panjang, rencana organisasi dan uraian tugas, prosedur operasi standar, gambar nyata laksana, pedoman penilaian kerja karyawan, rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP), tertib laporan internal, tertib laporan eksternal, opini auditor independent, tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun terakhir.

Nilai Indikator Kinerja Aspe Administrasi berdasarkan Kepmendagri No.47 Tahun 1999 memiliki sepuluh aspek atau criteria penilaian yang masing-masing memiliki indikator penilaian seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.3.

Tabel 2.1
Aspek Keuangan

No	Indikator	Nilai Indikator Kinerja	
		Rasio	Nilai
1	Rasio laba terhadap aktiva produktif $\frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{aktiva produktif}} \times 100\%$	> 10%	5
		> 7%-10%	4
		> 3%-7%	3
		> 0%-3%	2
		<= 0%	1
2	Rasio laba terhadap penjualan $\frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{aktiva produktif}} \times 100\%$	> 20%	5
		> 14%-20%	4
		> 6%-14%	3
		> 0%-6%	2
		<= 0%	1
3	Rasio aktiva lancar terhadap ekuitas $\frac{\text{aktiva lancar}}{\text{utang lancar}}$	> 1,75-2,00	5
		>1,50-1,75atau	4
		>2,00-2,30	3
		>1,25-1,50 atau	3
		>2,30-2,70	2
		>1,00-1,25 atau	2
4	Rasio utang jangka panjang terhadap total utang $\frac{\text{utang jangka panjang}}{\text{ekuitas}}$	>2,70-3,00	1
		<= 1,00 atau 3,00	1
4	Rasio utang jangka panjang terhadap total utang $\frac{\text{utang jangka panjang}}{\text{ekuitas}}$	<= 0,5	5
		<0,5-0,7	4
5	Rasio total aktiva terhadap total utang $\frac{\text{total aktiva}}{\text{total utang}}$	> 2,0	5
		> 1,7-2,0	4
		> 1,3-1,7	3
		> 1,0-1,3	2
		<= 1,0	1
6	Rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi $\frac{\text{biaya operasi}}{\text{penjualan produk}}$	<= 0,5	5
		> 0,5-0,65	4
		> 0,65-0,85	3
		> 0,85-1,0	2
		> 1,0	1
7	Rasio laba operasi sebelum biaya penyusutan terhadap angsuran pokok dan bunga jatuh tempo $\frac{\text{laba operasi sebelum biaya penyusutan}}{(\text{angsuran pokok} + \text{bunga})\text{jatuh tempo}}$	> 2,0	5
		> 1,7-2,0	4
		> 1,3-1,7	3
		> 1,0-1,3	2
		<= 1,0	1
8	Rasio aktiva produktif terhadap penjualan air $\frac{\text{aktiva produktif}}{\text{penjualan air}}$	<= 2	5
		> 2-4	4
		> 4-6	3
		> 6-8	2
		>8	1
9	Jangka waktu penagih piutang $\frac{\text{piutang usaha}}{\text{jumlah penjualan/hari}}$	<= 60	5
		> 60-90	4
		> 90-150	3
		> 150-180	2
		>180	1
10	Efektifitas penagihan $\frac{\text{rekening tertagih}}{\text{penjualan air}}$	> 90%	5
		> 85%-90%	4
		> 80%-85%	3
		> 75%-80%	2
		<= 75%	1
Jumlah nilai kinerja maksimum aspek keuangan			60

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negri No. 47 tahun 1999

Tabel 2.2
Aspek Operasional

No.	Rasio	Nilai Indikator Kinerja	
		Keterangan	Nilai
1	Cakupan pelayanan $\frac{\text{Jumlah penduduk terlayani}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100\%$	> 60%	5
		> 60%-80%	4
		>40%-60%	3
		> 20%-40%	2
		<= 20%	1
2	Kualitas distribusi air - Memenuhi syarat air minum - Memenuhi syarat air bersih - Tidak memenuhi syarat	-	3
		-	2
		-	1
3	Kontinuitas air - Semua pelanggan mendapat aliran air 24 jam - Belum semua pelanggan mendapat aliran air 24 jam	-	2
		-	1
4	Produktivitas pemanfaatan $\frac{\text{Kapasitas Produksi}}{\text{Kapasitas Terpasang}} \times 100\%$	> 90%	4
		> 80%-90%	3
		> 70%-80%	2
		<= 70%	1
5	Tingkat kehilangan air $\frac{\text{jmlh m}^3 \text{ air yg didistribusikan yg terjual}}{\text{jumlah m}^3 \text{ yang didistribusikan}} \times 100\%$	<= 20%	4
		> 20%-30%	3
		>30%-40%	2
		< 40%	1
6	Peneraan meter air $\frac{\text{jumlah pelanggan yg materainya di tera}}{\text{jumlah seluruh pelanggan}}$	> 205-25%	3
		> 10%-20%	2
		> 0%-10% atau > 25%	1
7	Kecepatan penyambungan air - Kurang dari 6 hari - Lebih dari 6 hari	<= 6 hari kerja	2
		> 6 hari kerja	1
8	Kemampuan penanganan pengaduan rata-rata perbulan $\frac{\text{jmlh pengaduan yg tih selesai ditangani}}{\text{jumlah seluruh pengaduan}} \times 100\%$	> = 80%	2
		< 80%	1
9	Kemudahan pelayanan - Tersedia - Tidak tersedia	Tersedia	2
		Tidak tersedia	1
10	Rasio karyawan per 1000 pelanggan $\frac{\text{jumlah karyawan}}{\text{jumlah pelanggan}} \times 100\%$	<= 8	5
		> 8 – 11	4
		> 11-15	3
		> 15-18	2
		> 18	1
Jumlah nilai kinerja maksimum aspek operasional			47

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 tahun 1999

Tabel 2.3
Aspek Administrasi

NO	Rasio	Nilai Indikator Kinerja	
		Keterangan	Nilai
1	Rencana jangka panjang	- Sepenuhnya dipedomani - Dipedomani sebagian - Memiliki, belum dipedomani - Tidak memiliki	4 3 2 1
2	Rencana organisasi dan uraian tugas	- Sepenuhnya dipedomani - Dipedomani sebagian - Memiliki, belum dipedomani - Tidak memiliki	4 3 2 1
3	Prosedur operasi standar	- Sepenuhnya dipedomani - Dipedomani sebagian - Memiliki, belum dipedomani - Tidak memiliki	4 3 2 1
4	Gambar nyata laksana	- Sepenuhnya dipedomani - Dipedomani sebagian - Memiliki, belum dipedomani - Tidak memiliki	4 3 2 1
5	Pedoman penilaian kerja karyawan	- Sepenuhnya dipedomani - Dipedomani sebagian - Memiliki, belum dipedomani - Tidak memiliki	4 3 2 1
6	Rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP)	- Sepenuhnya dipedomani - Dipedomani sebagian - Memiliki, belum dipedomani - Tidak memiliki	4 3 2 1
7	Tertib laporan internal	- Dibuat tepat waktu - Tidak tepat waktu	4 3 2 1
8	Tertib laporan Eksternal	- Dibuat tepat waktu - Tidak tepat waktu	2 1
9	Opini auditor independent	- Wajar tanpa pengecualian - Wajar dengan pengecualian - Tidak memberikan pendapat - Pendapat tidak wajar	4 3 2 1
10	Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun terakhir	- Tidak ada temuan - Ditindaklanjuti, seluruhnya selesai - Ditindaklanjuti, sebagian selesai - Tidak ditindaklanjuti	4 3 2 1
		Jumlah nilai kinerja maksimum aspek administrasi	36

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 tahun 1999

2.7 Penelitian Terkait

Penelitian terkait kinerja keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), telah banyak dilakukan oleh peneliti lain. Berikut beberapa penelitian tersebut,

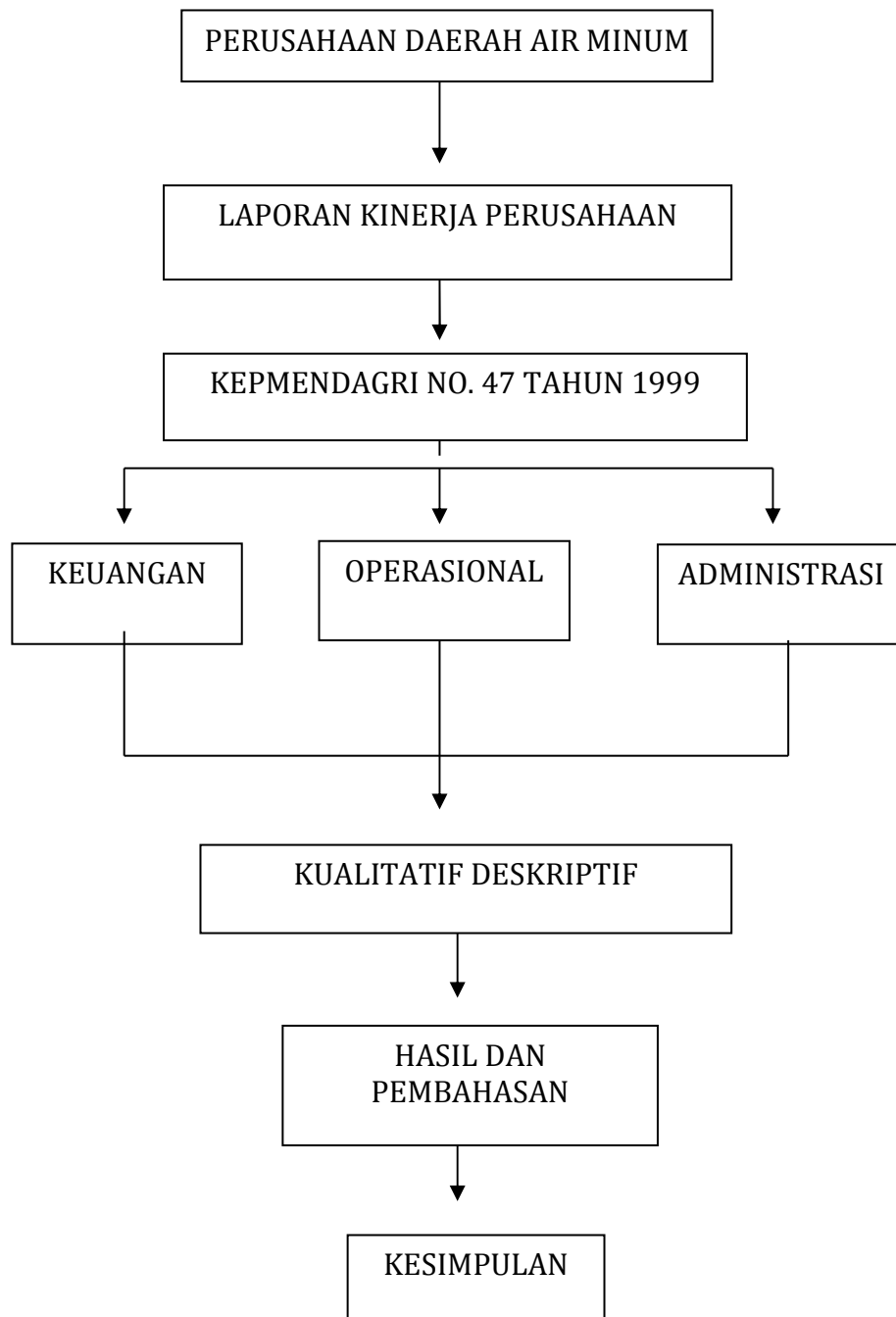
1. Penelitian terdahulu terhadap kinerja PDAM diberbagai daerah di Indonesiadilakukan oleh Farohma, (2001). Fahrohma meneliti tentang kinerja aspek keuangan dan aspek operasional PDAM Tirta Musi Palembang dnegan membandingkan dua PDAM Surabaya dan PDAM kota Bogor dengan menggunakan data tahun 1998. Penelitian ini dapat menggambarkan perbandingan kinerja satu PDAM dengan dua PDAM lainnya pada tahun yang sama. Metode yang digunakan dalam penilaian kinerja pada aspek keuangan menggunakan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Pemantauan Kinerja Keuangan PDAM sedangkan Penilaian aspek pelayanan dilakukan berdasarkan dengan Kepmendagri No.47 Tahun 1999 tentang penilaian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan PDAM Tirta Musi Palembang, PDAM Surabaya dan PDAM Kota Bogor pada kondisi yang kurang sehat pada aspek pelayanan menunjukkan kinerja belum memuaskan. Kelemahan dari penelitian ini bahwa penilaian kinerja pada aspek keuangan menggunakan Kepmendagri No.069.900.327 tahun 1994 terdiri dari tiga indikator yaitu struktur hutang, tingkat equitas dan tingkat keuntungan, bahwa Kepmendagri No.069.900.327 Tahun 1994 kemudian diganti dengan Kepmendagri No.47 Tahun 1999 tentang Pedoman Kinerja

PDAM yang lebih luas cakupan penilaiannya yaitu aspek keuangan, operasional dan administrasi.

2. Penelitian sebelumnya dalam hal Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dilakukan oleh Jacob (2003), Jacob melakukan penelitian dengan judul : “Kinerja Perusahaan Air Minum (PDAM) Kabupaten Kupang Periode 1998-2001”. Teknik analisis data yang digunakan adalah Kepmendagri No.47 tahun 1999 tentang pedoman Penilaian Kinerja PDAM. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang. Dari penelitian ini, penulis berkesimpulan dengan diketahui nilai kinerja PDAM Kabupaten Kupang dari tahun 1998-2001 sesuai dengan Kepmendagri.
3. Dalam penelitian Fahrohma dan Jacob Laurens, yang membedakan dengan penelitian penulis hanya terletak dalam tempat dan periode penelitian. Fahrohma (2001) melakukan penelitian di tiga tempat yaitu pada PDAM Tirta Musi Palembang dengan membandingkan pada dua PDAM yaitu PDAM Surabaya dan PDAM Kota Bogor dengan menggunakan metode penelitian Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994, dan Jacob Laurens tempat penelitiannya di Kabupaten Kupang periode 1998-2001, , sedangkan Penulis Tempat penelitiannya di Kabupaten Gowa Periode 2016-2017 menggunakan metode Kepmendagri No.47 Tahun 1999.

2.8 Kerangka Pikir

Kinerja adalah prestasi/pencapaian kerja yang telah dilakukan manajemen atas strategi pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Evaluasi kinerja bertujuan untuk membantu manajemen PDAM dalam mendorong pencapaian tujuan secara ekonomis, efisien, efektif, memperbaiki dan meningkatkan kinerja, serta memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab.



Gambar 2.1 (Kerangka Pikir)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga dapat ditarik kesimpulan.

a. **Data Primer**

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Data tersebut diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pimpinan maupun karyawan yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini.

b. **Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) yaitu laporan keuangan dan rencana kerja.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum Jeneberang Kabupaten Gowa pada bulan Februari sampai bulan Maret 2019.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

1. **Subjek Penelitian**

Kepala bagian keuangan, kepala bagian oprasional, kepala bagian administrasi.

2. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gowa.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan wawancara atau Tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait dengan penelitian.

2. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari dokumen laporan keuangan perusahaan dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.5 Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gowa dari aspek keuangan, aspek operasional, aspek administrasi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.47 tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum. Data yang diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi dihitung dengan menggunakan rasio yang sudah diatur dalam Kepmendagri No.47 tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Kinerja PDAM dilihat dari 3 aspek :

1. Aspek Keuangan adalah faktor yang menentukan biaya yang dikeluarkan serta dihasilkan untuk membuat sebuah usaha yang optimal. Rasionya dapat dilihat pada tabel 3.1

2. Aspek Operasional adalah konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran suatu variable atau dapat diartikan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan penelitian. Rasionya dapat dilihat pada tabel 3.2 .
3. Aspek Administrasi adalah usaha atau kegiatan yang berkenan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan administrasi. Rasionya dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.1
Aspek Keuangan

No	Rasio	Keterangan	Nilai
1	Rasio laba terhadap aktiva produktif	$\frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Aktiva produktif}} \times 100\%$	1-5
2	Rasio laba terhadap penjualan	$\frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Penjualan produk}} \times 100\%$	1-5
3	Rasio aktiva lancar terhadap utang lancar	$\frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Utang lancar}}$	1-5
4	Rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas	$\frac{\text{Utang jangka panjang}}{\text{Ekuitas}}$	1-5
5	Rasio total aktiva terhadap total utang	$\frac{\text{Total aktiva}}{\text{Total utang}}$	1-5
6	Rasio laba operasi terhadap pendapatan operasi	$\frac{\text{Biaya operasi}}{\text{Penjualan produk}}$	1-5
7	Rasio laba operasi sebelum by. penyusutan terhadap angsuran pokok & bunga jatuh tempo	$\frac{\text{Laba operasi sebelum by. penyusutan}}{(\text{Angsuran pokok} + \text{bunga}) \text{ jatuh tempo}}$	1-5
8	Rasio aktiva produktif terhadap penjualan air	$\frac{\text{Aktiva produktif}}{\text{Penjualan air}}$	1-5
9	Jangka waktu penagihan piutang	$\frac{\text{Piutang usaha}}{\text{Jumlah penjualan/hari}}$	1-5
10	Efektifitas penagihan	$\frac{\text{Rekening tertagih}}{\text{Penjualan air}}$	1-5
Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 tahun 1999			

Tabel 3.2
Aspek Operasional

No	Rasio	Keterangan	Nilai
1	Cakupan pelayanan	$\frac{\text{Jumlah penduduk terlayani}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	1-5
2	Kualitas distribusi air	- Memenuhi Syarat air minum - Memenuhi syarat air bersih - Tidak memenuhi syarat	1-3
3	Kontinuitas air	- Semua pelanggan mendapat aliran air 24 jam - Belum semua pelanggan mendapat aliran air 24 jam	1-2
4	Produktivitas pemanfaatan	$\frac{\text{Kapasitas produksi}}{\text{kapasitas terpasang}} \times 100\%$	1-4
5	Tingkat kehilangan air	$\frac{\text{jumlah m}^3\text{air yang didistribusi yg terjual}}{\text{jumlah m}^3\text{yang didistribusikan}} \times 100\%$	1-4
6	Peneraan meter air	$\frac{\text{jumlah pengaduan yg telah selesai ditangani}}{\text{jumlah seluruh pengaduan}} \times 100\%$	1-3
7	Kecepatan penyambungan air	- Kurang dari 6 hari - Tidak tersedia	1-2
8	Kemampuan penanganan pengaduan rata-rata perbulan	$\frac{\text{jumlah pengaduan yg telah selesai ditangani}}{\text{jumlah seluruh pengaduan}} \times 100\%$	1-2
9	Kemudahan pelayanan	- Tersedia - Tidak tersedia	1-2
10	Rasio karyawan per 1000 pelanggan	$\frac{\text{Jumlah karyawan}}{\text{Jumlah pelanggan}} \times 100\%$	1-2
Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 tahun 1999			

Tabel 3.3
Aspek Administrasi

No	Rasio	Keterangan	Nilai
1	Rencana jangka panjang	- Sepenuhnya dipedomani - Dipedomani sebagian - Memiliki, belum dipedomani - Tidak memiliki	1-4
2	Rencana organisasi dan uraian tugas	- Sepenuhnya dipedomani - Dipedomani sebagian - Memiliki, belum dipedomani - Tidak memiliki	1-4
3	Prosedur operasi standar	- Sepenuhnya dipedomani - Dipedomani sebagian - Memiliki, belum dipedomani - Tidak memiliki	1-4
4	Gambar nyata laksana	- Sepenuhnya dipedomani - Dipedomani sebagian - Memiliki, belum dipedomani - Tidak memiliki	1-4
5	Pedoman penilaian kerja karyawan	- Sepenuhnya dipedomani - Dipedomani sebagian - Memiliki, belum dipedomani - Tidak memiliki	1-4
6	Rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP)	- Sepenuhnya dipedomani - Dipedomani sebagian - Memiliki, belum dipedomani - Tidak memiliki	1-4
7	Tertib laporan internal	- Dibuat tepat waktu - Tidak tepat waktu	1-2
8	Tertib laporan eksternal	- Dibuat tepat waktu - Tidak tepat waktu	1-2
9	Opini auditor independent	- wajar tanpa pengecualian - wajar dengan pengecualian - Tidak memberikan pendapat - Pendapat tidak wajar	1-4
10	Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun terakhir	- tidak ada teman - ditindaklanjuti, seluruhnya selesai - ditindaklanjuti, sebagian selesai - tidak ditindaklanjuti	1-4
Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 tahun 1999			

Tabel 3.4
Klasifikasi Nilai

No	Nilai	Keterangan
1	1	Kurang
2	2	Kurang
3	3	Cukup
4	4	Baik
5	5	Sangat Baik

Dalam Kepmendagri juga telah tercantum bobot, jumlah indikator dan maksimum nilai yang dipergunakan untuk menentukan perhitungan dari aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi, seperti dalam table 3.4

Tabel 3.5
Aspek Keuangan, Aspek Operasioal, Aspek Administrasi

Aspek	Bobot	Jumlah Indikator	Maksimum Nilai
Keuangan	45	10	60
Operasional	40	10	47
Administrasi	15	10	36
Jumlah	100	30	143
Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 tahun 1999			

Setelah diperoleh hasil dari perhitungan rasio dari ke 30 (tiga puluh) indikator maka dapat dinilai dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Aspek Keuangan} = \frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh}}{\text{Maksimum nilai}} \times \text{bobot}$$

$$\frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh}}{60} \times 45$$

$$\text{Aspek Operasional} = \frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh}}{\text{Maksimum nilai}} \times \text{bobot}$$

$$\frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh}}{47} \times 40$$

$$\text{Aspek Administrasi} = \frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh}}{\text{Maksimum nilai}} \times \text{bobot}$$

$$\frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh}}{36} \times 15$$

Nilai yang diperoleh dari perhitungan indikator masing-masing aspeknya menurut Kepmendagri No. 47 Tahun 1999, kemudian dijumlah. Hasil dari penjumlahan setiap aspek dibagi maksimum nilai dikalikan dengan bobot setiap aspeknya. Hasil yang diperoleh dari penjumlahan nilai dari aspek keuangan, aspek operasional, aspek administrasi dapat digolongkan dengan menggunakan klasifikasi kinerja PDAM dalam table 3.5

Tabel 3.6
Klasifikasi Kinerja

Nilai Kinerja	Kinerja
> 75	Baik sekali
60-75	Baik
45-60	Cukup
40-45	Kurang
<=30	Tidak Buruk
Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 tahun 1999	

1.6 Definisi Oprasional

Evaluasi kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), merupakan kegiatan penilaian dan pengukuran tiap-tiap aspek penilaian kinerja sehingga dapat diketahui kualitas dan capaian kinerja PDAM dalam memberikan pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat. Evaluasi kinerja PDAM juga merupakan salah satu upaya untuk melihat dan sekaligus mengukur tingkat kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan, sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan PDAM yang bersangkutan. Untuk mendapatkan hasil evaluasi kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan, evaluasi

kinerja PDAM dilakukan dengan menghitung capaian kinerja berdasarkan laporan keuangan PDAM yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) serta laporan audit kinerja yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Perusahaan

Sebagai sarana pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Sungguminasa dan penduduk Kabupaten Dati II Gowa umumnya, maka pada tahun 1980 satu unit pengolahan air bersih mulai didirikan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum cabang Dinas Kabupaten Gowa dimana pengolahan dan pengawasannya dilaksanakan oleh Proyek Pengelolaan Sarana Air Bersih (PPSAB) Propinsi Sulawesi Selatan.

Dengan kapasitas produksi air bersih 10 lt/dtk pada tahun 1981 unit pengolahan air Kabupaten Gowa mulai memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Sungguminasa, hingga pada tahun 1982 tanggal 8 September dengan adanya Berita Acara penyerahan ASSET Pemerintah Pusat oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah tingkat II Kabupaten Gowa, bersama itu pula Unit Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Gowa dimana pengelolaan dan tanggung jawabnya masih tetap pada PPSAB Propinsi Sulawesi Selatan dengan mengangkat pegawai bagi BPAM dimaksud dan memperbantukan 3 orang Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah tingkat II Gowa.

Sejalan dengan perkembangan pembangunan Kabupaten Dati II Gowa, kebutuhan air bersih masyarakat kota bertambah besar sehingga dengan kapasitas produksi 10 lt/dtk terasa sudah tidak mencukupi lagi.

Oleh PPSAB Propinsi Sulawesi Selatan diajukanlah Proposal Pengembangan rencana penambahan kapasitas produksi air bersih sebesar 20 lt/dtk. Pada tahun 1985/1986 rencana penambahan kapasitas dapat direalisasikan dengan terlaksananya pembangunan Instalasi Pengolahan Air tersebut yang berlokasi di Kampung Cambaya, Kelurahan Sungguminasa. Tetapi sangat disayangkan bahwa dengan adanya Instalasi Pengolahan Air yang baru tersebut, instalasi yang lama tidak lagi mendapat perhatian dengan baik sehingga unit pengolahan tersebut rusak dan tidak dapat difungsikan lagi.

Pada tahun 1988 oleh Pemerintah Daerah tingkat II Gowa menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tanggal 15 Maret 1988 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Gowa.

Karena unit pengelolaan air bersih telah ada di Kabupaten Gowa yaitu Badan Pengelola Air Minum milik Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen PU cabang Dinas Kabupaten Gowa, maka oleh Pemerintah Daerah tingkat II Gowa mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk penyerahan pengelolaan Badan tersebut kepada Pemerintah Daerah tingkat II Gowa sehingga pada tahun 1991 tepatnya tanggal 23 Februari, dengan terbitnya SK Menteri P.U. dengan Nomor: 75/KPTS/1991. Tanggal 9 Februari 1991 Tentang Penyerahan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Air Bersih di Kabupaten Dati II Gowa, terlaksanalah penandatanganan Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Minum Kabupaten Gowa menjadi PDAM Kabupaten Dati II Gowa.

Perkembangan pembangunan Kabupaten Dati II Gowa yang demikian pesatnya dan dengan adanya pembangunan unit-unit perumahan sebagai akibat Ibu Kota Kabupaten Gowa yang sangat dekat dengan Kota Madya Ujung Pandang, Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan secara tidak langsung mengakibatkan pertumbuhan jumlah penduduk yang membutuhkan air bersih meningkat pula, sehingga Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Gowa dengan tingkat kapasitas produksi 20 lt/dtk dirasakan tidak lagi mencukupi kebutuhan air minum penduduk Kota Sungguminasa.

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gowa dalam usaha memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota yang semakin meningkat, telah memperoleh bantuan pemerintah pusat melalui dana APBN Tahun Anggaran 1994/1995 yaitu penambahan kapasitas produksi 20 lt/dtk yang pembangunannya dapat direalisasikan Januari 1995. Dengan selesainya pembangunan tambahan Instalasi Pengolahan Air pada bulan Maret 1995, maka produksi air bersih menjadi 40 lt/dtk yang mulai beroperasi pada bulan April 1995.

Pada saat kapasitas produksi air bersih PDAM Kabupaten Gowa masih 20 lt/dtk banyak sambungan rumah yang tidak memperoleh air bersih pada saat yang bersamaan, disebabkan jumlah sambungan rumah melebihi kapasitas produksi yaitu sebanyak 2.655 SR. Tetapi setelah beroperasinya instalasi pengolahan air yang baru maka produksi air bertambah 2 kali lebih besar sehingga dengan jumlah langganan per Desember 1995 yang hanya 2.655 SR terasa berlebihan bila dijalankan *pool capacity* sehingga produksi air yang dilakukan pada saat ini hanya sebesar 30 lt/dtk.

Program Nasional dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih pada pelita VI ini adalah untuk masyarakat perkotaan sebesar 80% dan untuk masyarakat pedesaan sebesar 60%, sehingga PDAM Kabupaten Gowa sampai saat ini dalam hal pengelolaan air bersih belum mencapai target tersebut, dimana dari jumlah penduduk Kecamatan Somba Opu yang yang mengkonsumsi air bersih baru berkisar 29%, sudah termasuk sambungan rumah BTN. Minasa Upa penduduk Kota Madya Ujung Pandang.

4.2 Pengembangan Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat

Sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Dati II Gowa menjadi Daerah Percontohan Pelaksanaan Otonomisasi Daerah di Sulawesi Selatan dan menjadi alternatif pilihan tempat pemukiman bagi sebagian penduduk Kota Madya Ujung Pandang karena jaraknya yang sangat dekat, sehingga suka atau tidak suka segenap unsur aparat Pemerintah Daerah tingkat II Gowa harus menyiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan-perkembangan baik dari Kabupaten Gowa sendiri maupun akibat pembangunan Kota Madya Ujung Pandang.

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gowa dalam hal ini harus dapat mengantisipasi perkembangan/pertumbuhan jumlah penduduk urban dalam rangka pencapaian target Program Nasional 80% pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat perkotaan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat PDAM Kabupaten Gowa perlu memperhatikan beberapa hal antara lain:

1. Efektifitas jaringan distribusi
2. Efisiensi produksi air bersih

3. Peningkatan sumber daya manusia menuju profesionalisme
4. Proporsionalisasi manajemen perusahaan.

Sebagai perusahaan yang baru melaksanakan pengurusan sendiri dimana diharapkan dapat menjadi perusahaan yang mandiri dan dapat menjadikan salah satu unit kerja yang mampu meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah bagi Kabupaten Dati II Gowa, maka sangat ditentukan oleh adanya perbaikan dan pembenahan mendasar secara menyeluruh dan konsisten pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Gowa.

Untuk dapat merealisasikan perubahan-perubahan mendasar tersebut maka sangat diharapkan perhatian Pemerintah Daerah yang lebih besar melalui Badan Pengawas untuk menjabarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan PDAM dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Perusahaan Daerah Air Minum yang mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai perusahaan yang harus memperhatikan profit agar dapat terus berproduksi dan juga mempunyai fungsi sosial yaitu mengutamakan penyediaan air bersih bagi kepentingan masyarakat umum.

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gowa pada saat ini masih cukup jauh dari apa yang menjadi tujuan pendiriannya bagi Kabupaten Dati II Gowa utamanya bagi masyarakat secara menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya keluhan langganan dan permohonan menjadi langganan yang belum dapat dipenuhi dan juga dari kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang ditargetkan bagi perusahaan belum dapat direalisasikan sepenuhnya. Kendala tersebut disebabkan karena kemampuan perusahaan utamanya pada cadangan dana

operasional yang sangat terbatas sehingga kebutuhan-kebutuhan untuk menanggapi keluhan langganan dan permohonan calon langganan tidak semuanya dapat kami laksanakan jika perusahaan tidak melakukan/menerapkan sistem skala prioritas dalam rangka menanggapi permasalahan dari langganan dan juga kewajiban perusahaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Gowa yang telah menjadi garis kebijaksanaan Pemerintah Daerah secara keseluruhan.

4.3 Visi dan Misi

Visi

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gowa menjadi PDAM Mandiri Profesional yang Mengutamakan keputusan dengan memberikan pelayanan yang Prima kepada Masyarakat.

Misi

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gowa sebagai Perusahaan Daerah Air Minum akan memberikan penyediaan air yang memenuhi syarat :

Kwalitas : Air yang sehat dan layak

Kwantitas : Debet air yang cukup

Kontinuitas : Mengalirkan air 24 Jam Operasi.

Terjangkau : Harga air dapat dibeli oleh masyarakat serta peningkatan kesejahteraan karyawan yang lebih baik.

4.4 Kelembagaan Dan Struktur Organisasi PDAM

Dasar Pengaturan Kelembagaan PDAM Kabupaten Gowa adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum.
3. Instruksi Menteri Dalam Negri Nomor 25 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gowa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gowa.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gowa.

Kelembagaan PDAM Kabupaten Gowa mencakup unsure-unsur antara lain:

- a. Pemilik : Pemerintah Kabupaten Gowa
- b. Unsur Pengawas Umum : Badan Pengawas
- c. Unsur Pemimpin : - Direksi PDAM
-Direktur Utama
-Direktur Bidang Teknik
- d. Unsur Pelaksana : -Kepala Pengawas Intern
-Kepala Bagian
-Kepala Cabang
-Kepala Seksi

Tugas jabatan karyawan PDAM tirta Jeneberang

a. Unsur pengawas bertugas mengontrol jajaran direksi agar target dan capaian dapat dipenuhi.

b. Unsur pemimpin :

1. Direktur Administrasi dan Keuangan

Bertugas menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian kegiatan di Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Langgan. Direktur Administrasi dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. Merumuskan perencanaan serta mengendalikan program-program di Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Langgan.

2. Merumuskan perencanaan dan pengendalian sumber-sumber pendapatan dan belanja serta kekayaan perusahaan.

3. Menyusun laporan dokumen tugas dan evaluasi sesuai bidang tugas.

4. Melakukan koordinasi dengan direktur teknik dalam rangka peningkatan pelayanan.

5. Memberikan pertimbangan untuk pengambilan keputusan mengenai hubungan kerjasama dengan pihak ke tiga.

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama sesuai dengan bidang tugas.

2. Direktur teknik

1. Memimpin semua kegiatan dan perencanaan yang berkaitan dengan pengolahan distribusi air, pemeliharaan sumber-sumber air serta penyediaan air bersih.

2. Menyetujui rencan yang diajukan oleh seluruh bagian yang berada dibawah koordinasinya.

3. Memberikan keputusan untuk penyelesaian masalah prinsip yang berkaitan dengan tugasnya.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Perhitungan dan Hasil Perhitungan Kinerja Keuangan Tahun 2016-2017

a. Rasio Laba Terhadap Aktiva Produktif

Rasio laba terhadap aktiva produktif digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari jumlah asset produktif yang dikelola.

$$\frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Aktiva produktif}} \times 100 \%$$

Tabel 4.6.1.1
Perhitungan dan Nilai Laba Terhadap Aktiva Produktif

Tahun	Laba Sebelum Pajak	Aktiva Produktif	Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif	Nilai
2016	Rp.625.503.520,37	Rp. 43.683.649.286,00	1,43%	2
2017	Rp.1.811.939.949,78	Rp. 64.197.994.504	2,82%	2

Sumber: Data Keuangan PDAM Kab.Gowa (Lampiran 3)

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2016 rasio laba terhadap aktiva produktif hanya 1,43 yang berarti masih kurang, dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 senilai 2,82% tetapi rasio laba tersebut masih kurang, maka langkah yang dilakukan PDAM untuk meningkatkan rasio laba terhadap aktiva produktif yaitu meningkatkan laba dengan cara penagihan yang lebih efisien menjadi rata-rata 80% aktiva produktif dengan langkah efisiensi penggunaan anggaran lebih diperketat, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A.Malik Abbas selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal.

b. Rasio Laba terhadap Penjualan

Rasio laba terhadap penjualan digunakan untuk mengukur laba yang dapat diperoleh dari jumlah penjualan dalam tahun berjalan.

$$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Penjualan Produk}} \times 100 \%$$

Tabel 4.6.1.2
Perhitungan dan Nilai terhadap Penjualan

Tahun	Laba Sebelum Pajak	Penjualan Produk	Rasio Laba terhadap Penjualan	Nilai
2016	Rp.625.503.520,37	Rp. 26.150.477.850,00	2,39%	2
2017	Rp.1.811.939.949,78	Rp. 31.524.604.390,00	5,75%	2

Sumber: Data Keuangan PDAM Kab.Gowa (Lampiran 3)

Berdasarkan tabel diatas rasio laba terhadap penjualan juga masih dikategorikan kurang karna hanya mendapat nilai 2,39% pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup baik yaitu 5,75% tetapi masih dikategorikan kurang, maka langkah yang di lakukan PDAM yaitu meningkatkan laba sebelum pajak dengan penjualan air kubikasi yang tinggi ke pelanggan dengan mengurangi kebocoran/kehilangan air, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A.Malik Abbas selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal.

c. Rasio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar (*Liquiditas*)

Merupakan tolak ukur menilai ketersediaan asset-aset likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dalam rangka membiayai kegiatan operasi maupun pembayaran hutang dan bunga yang jatuh tempo jika ada.

$$\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

Tabel 4.6.1.3
Perhitungan dan Nilai Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar

Tahun	Aktiva Lancar	Utang Lancar	Rasio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar	Nilai
2016	Rp. 12.764.428.418,22	Rp. 317.919.807,00	40,15	1
2017	Rp. 16.888.055.736,83	Rp. 717.896.352,00	23,52	1

Sumber: Data Keuangan PDAM Kab.Gowa (Lampiran 3)

Berdasarkan tabel diatas rasio aktiva lancar terhadap utang lancar dikategorikan kurang karna hanya mendapat nilai 40,15 pada tahun 2016 dan mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu 23,52 dan masing-masing mendapat nilai 1. Maka langkah yang dilakukan PDAM agar dapat meningkatkan rasio aktiva lancar terhadap utang lancar meningkatkan penjualan air, efisiensi penagihan dimana kondisi saat ini hanya 65-69% ditingkatkan menjadi 70-80%, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A.Malik Abbas selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal.

d. Rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*)

Rasio jangka panjang terhadap ekuitas digunakan untuk keseimbangan antara dua sumber pendanaan yang digunakan membiayai asset perusahaan, yaitu modal dan hutang.

$$\frac{\text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Ekuitas}}$$

Tabel 4.6.1.4
Perhitungan dan Nilai Utang Jangka Panjang terhadap Ekuitas

Tahun	Utang Jangka Panjang	Ekuitas	Rasio Utang JP terhadap Ekuitas	Nilai
2016	Rp. 47.614.000,00	Rp. 43.318.115.479,13	0,001	5
2017	Rp. 45.430.000,00	Rp. 63.434.668.152,91	0,0007	5

Sumber: Data Keuangan PDAM Kab.Gowa (Lampiran 3)

Berdasarkan tabel diatas rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas sudah sangat baik dengan nilai 0,001 pada tahun 2016 dan 0,0007 pada tahun 2017 dengan nilai 5. Hal ini disebabkan karena utang jangka panjang berkurang akan menguatkan ekuitas, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A.Malik Abbas selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal.

e. Rasio total aktiva terhadap total utang (*Solvabilitas*)

Rasio total aktiva terhadap total utang merupakan tolak ukur untuk menilai tingkat kecukupan dari seluruh asset yang tersedia dibandingkan dengan seluruh hutang perusahaan yang sekaligus mencerminkan jumlah aktiva neto.

$$\frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Utang}}$$

Tabel 4.6.1.5
Perhitungan dan Nilai Total Aktiva terhadap Total Nilai Utang

Tahun	Total Aktiva	Total Utang	Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang	Nilai
2016	Rp. 43.683.649.286,00	Rp. 365.533.806,50	11,51	5
2017	Rp. 64.197.994.504,91	Rp. 763.326.352,00	84,10	5

Sumber: Data Keuangan PDAM Kab.Gowa (Lampiran 3)

Berdasarkan tabel diatas rasio total aktiva terhadap total utang pada tahun 2016 senilai 11,51 mendapatkan nilai 5 dan mendapat kategori dangat baik, dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 senilai 84,10 dengan nilai 5 dan mendapat kategori sangat baik. Hal ini disebabkan karena total aktiva pada tabel diatas menunjukkan bahwa total aktiva lebih banyak dibandingkan dengan total utang perusahaan, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A.Malik Abbas selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal.

f. Rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi (*Operating Ratio*)

Rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi merupakan tolak ukur untuk menilai efisiensi/penghematan dalam menggunakan sumber dana dan sumber daya untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan.

$$\frac{\text{Biaya Operasi}}{\text{Pendapatan Operasi}}$$

Tabel 4.6.1.6
Perhitungan dan Nilai Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi

Tahun	Biaya Operasi	Pendapatan	Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi	Nilai
2016	Rp. 28.955.952.932,00	Rp. 29.515.495.850,00	0,98	2
2017	Rp. 31.002.363.847	Rp. 31.524.604.390,00	0,98	2

Sumber: Data Keuangan PDAM Kab.Gowa (Lampiran 3)

Berdasarkan tabel diatas rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi masih di kategorikan kurang dengan hasil 0,98 dan mendapat nilai 2. Hal ini disebabkan karna biaya operasional cukup tinggi sedangkan pendapatan operasional masih rendah, untuk meningkatkan rasio tersebut dengan mengekang biaya operasional seminimal mungkin dan meningkatkan pendapatan operasional semaksimal mungkin, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A.Malik Abbas selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal.

g. Rasio laba operasi sebelum biaya penyusutan terhadap angsuran pokok bunga.

Rasio laba operasi sebelum biaya penyusutan terhadap angsuran pokok dan bunga jatuh tempo digunakan untuk mengukur potensi dari laba yang dihasilkan dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga yang jatuh tempo,

$$\frac{\text{Laba Operasi sebelum Biaya Penyusutan}}{\text{Angsuran Pokok + Bunga Jatuh Tempo}}$$

Tabel 4.6.1.7
Perhitungan dan Nilai Laba Operasi sebelum Biaya Penyusutan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo

Tahun	Lab a Operasi sebelum Biaya Penyusutan	Angsuran Pokok dan Bunga Pinjaman	Rasio Lab a Operasi sebelum Biaya Penyusutan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo	Nil ai
2016	Rp. 4.378.486.279,50	Rp. 47.056.000	93,05	5
2017	Rp. 6.769.033.614,90	Rp. 79.440.000	85,21	5

Sumber: Data Keuangan PDAM Kab.Gowa (Lampiran 3)

Berdasarkan tabel diatas rasio laba operasi sebelum biaya penyusutan terhadap angsuran pokok dan bunga jatuh tempo sudah sangat baik dengan menghasilkan 93,05 pada tahun 2016 dan 85,21 pada tahun 2017 dan mendapat nilai 5. Hal ini hanya perlu dipertahankan oleh pihak PDAM agar tidak mengalami penurunan lagi pada tahun berikutnya, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A.Malik Abbas selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal.

h. Rasio aktiva produktif terhadap penjualan air.

Rasio aktiva produktif terhadap penjualan air digunakan untuk mengukur produktivitas/pendayagunaan dari asset-aset yang tertanam, dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka pengembalian investasi bagi pemegang saham dan pembayaran bunga kepada kreditor.

Aktiva Produktif
Penjualan Air

Tabel 4.6.1.8
Perhitungan dan Nilai Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air

Tahun	Aktiva Produktif	Penjualan Air	Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air	Nilai
2016	Rp. 43.683.649.286,00	Rp. 26.150.477.850	1,67	5
2017	Rp. 64.197.994.504,91	Rp. 27.703.695.390	2,32	4

Sumber: Data Keuangan PDAM Kab.Gowa (Lampiran 3)

Berdasarkan tabel diatas rasio aktiva produktif terhadap penjualan air sudah sangat baik. Dapat dilihat dari jumlah aktiva produktif dan penjualan pada tahun 2016 cukup tinggi dan menghasilkan rasio 1,67 dengan nilai 5. Dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 senilai 2,32 dengan nilai 5. Hal ini disebabkan karna efisiensi penagihan pendapatan air dari pelanggan idealnya 80-90%, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A.Malik Abbas selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal.

i. Jangka waktu penagihan piutang

Jangka waktu penagihan piutang merupakan tolak ukur untuk menilai efektivitas dari upaya manajemen dalam pengendalian piutang yaitu menilai waktunya rata-rata piutang tertagih menjadi kas.

$$\frac{\text{Piutang Usaha}}{\text{Jumlah Penjualan/hari}}$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp.29.515.495.850}}{360} = \text{Rp. 71.645.144,79}$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp.31.524.604.390}}{360} = \text{Rp. 87.568.345}$$

Tabel 4.7.1.9
Perhitungan dan Nilai Jangka Waktu Penagihan

Tahun	Piutang Usaha	Jumlah Penjualan Perhari	Rasio Jangka Waktu Penagihan	Nilai
2016	Rp. 5.174.803.132,50	Rp. 71.645.144,79	72,23	5
2017	Rp. 3.747.622.308,00	Rp. 87.568.345	42,80	4

Sumber: Data Keuangan PDAM Kab.Gowa (Lampiran 3)

Berdasarkan tabel diatas rasio jangka waktu penagihan dikategorikan sangat baik dengan rasio 72,23 dengan nilai 5 pada tahun 2016 tetapi mengalami penurunan pada tahun 2017 dengan rasio 42,80 dengan nilai 4, tetapi masih termasuk kategori sangat baik. Hal ini disebabkan karna penjualan air perhari cukup tinggi

sehingga dapat menutupi piutang usaha selama setahun, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A.Malik Abbas selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal.

j. Efektifitas penagihan

Efektifitas penagihan merupakan tolak ukur untuk menilai efektivitas dari upaya manajemen dalam pengendalian piutang yaitu menilai berapa persen piutang tertagih menjadi kas.

$$\frac{\text{Rekening Tertagih}}{\text{Penjualan Air}} \times 100 \%$$

Rekening tertagih adalah jumlah penerimaan dan rekening penjualan air yang diterbitkan selama 1 tahun buku.

Tabel 4.6.1.10
Perhitungan dan Nilai Efektifitas Penagihan

Tahun	Rekening Tertagih	Penjualan Air	Rasio Efektivitas Penagihan	Nilai
2016	Rp. 23.459.530.400,00	Rp. 26.150.477.850	85,83%	4
2017	Rp. 23.779.308.450,00	Rp. 27.703.695.390	89,71%	4

Sumber: Data Keuangan PDAM Kab.Gowa (Lampiran 3)

Berdasarkan tabel diatas rasio efektifitas penagihan pada tahun 2016 dengan rasio 85,83% dan pada tahun 2017 89,71% dengan nilai 4 dikategorikan sangat baik. Hal ini disebabkan karna efektifitas penagihan berkisaran 70-80%, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A.Malik Abbas selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal.

Berdasarkan perhitungan 10 indikator diatas Nilai kinerja Aspek Keuangan PDAM tahun 2016 yaitu 28,50% dan pada tahun 2017 27,74% jika di jumlahkan menghasilkan nilai 56,25%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja PDAM selama 2 tahun tersebut dikategorikan Cukup. Ada beberapa indikator yang masih perlu

diperhatikan oleh Pihak PDAM untuk dapat meningkatkan kategori Kinerja pada Aspek Keuangan ditahun berikutnya.

4.6.2 Perhitungan dan Hasil Perhitungan Kinerja Aspek Operasional Tahun 2016-2017

a. Cakupan pelayanan

Cakupan pelayanan menggambarkan kemampuan PDAM untuk menjalankan fungsi yaitu seberapa banyak penduduk yang dilayani oleh PDAM.

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Terlayani}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

Tabel 4.6.2.1
Perhitungan dan Nilai Cakupan Pelayanan

Tahun	Jumlah Penduduk terlayani	Jumlah Penduduk	Rasio Cakupan pelayanan	Nilai
2016	219.240	722.702	30,34%	3
2017	237.116	735.493	32,24%	3

Sumber: Data Keuangan PDAM Kab.Gowa (Lampiran 4)

Berdasarkan tabel diatas rasio cakupan pelayanan pada tahun 2016 dikategorikan cukup dengan rasio 30,34% sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi 32,24% dengan mendapat nilai masing-masing 3. Hal ini disebabkan karena pelayanan PDAM terhadap penduduk sudah cukup banyak walaupun masih jauh dari jumlah penduduk tersebut, tapi pihak PDAM akan terus meningkatkan pelayanan kepada penduduk setempat untuk hasil yang maksimal, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A.Malik Abbas selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal.

b. Kualitas Air Distribusi

Kegiatan PDAM adalah menyediakan air yang memenuhi syarat kesehatan untuk digunakan oleh masyarakat. Syarat kesehatan tersebut ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Pada masa yang akan datang, PDAM seharusnya mampu menyediakan air dengan standar kualitas air minum, tetapi sebelum mencapai kualitas air dengan kualitas air bersih. Persyaratan air minum ataupun air bersih ditetapkan oleh Departemen Kesehatan.

Tabel 4.6.2.2
Niali Kualitas Air Distribusi

Tahun	Kualitas	Nilai
2016	Memenuhi syarat air bersih	2
2017	Memenuhi syarat air bersih	2

Sumber: Data Keuangan PDAM Kab.Gowa (Lampiran 4)

Berdasarkan tabel diatas nilai kualitas air distribusi masih berada ditingkat kedua yaitu Memenuhi syarat air bersih, yang berarti aliran air PDAM masih sekedar untuk keperluan rumah tangga saja, belum dapat dikonsumsi/diminum langsung maka dari itu nilai kualitas air distribusi masih mendapat nilai 2, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A.Malik Abbas selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal.

c. Kontinuitas Air Distribusi

Yang dimaksud kontinuitas air adalah keseimbangan air mengalir dirumah pelanggan. Idealnya dapat mengalir tanpa henti selama 24 jam setiap hari disemua sambungan pelanggan.

Tabel 4.6.2.3
Niali Kontinuitas Air Distribusi

Tahun	Kontinuitas	Nilai
2016	Belum semua pelanggan mendapat aliran air 24 jam	1
2017	Belum semua pelanggan mendapat aliran air 24 jam	1

Sumber: Data Keuangan PDAM Kab.Gowa (Lampiran 4)

Berdasarkan tabel diatas nilai kontinuitas air distribusi masih dikategorikan kurang karna dari data yang diperoleh pelayanan aliran air belum semua pelanggan mendapat aliran air 24 jam. Hal ini dikarenakan jumlah pelayanan PDAM yang tinggi sedangkan jumlah pelayanan atau kapasitas untuk aliran air masih kurang, hal ini masih harus diperhatikan agar kedepannya PDAM dapat mengalirkan aliran air selama 24 jam, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A.Malik Abbas selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal.

d. Produktifitas Pemanfaatan Instalasi Produksi

Instalasi produksi dalam hal ini adalah bangunan beserta peralatannya yang menjadi satu kesatuan untuk memproduksi air dapat berupa instalasi pengolahan air, sumur bor atau dalam, unit pengambilan mata air serta pengolahannya.

Kapasitas produksi adalah kapasitas yang dioperasikan dalam menghasilkan produksi air.

$$\frac{\text{Kapasitas Produksi}}{\text{Kapasitas Terpasang}} \times 100\%$$

Tabel 4.6.2.4
Perhitungan dan Nilai Produktivitas Pemanfaatan Instalasi Produksi

Tahun	Kapasitas produksi	Kapasitas terpasang	Rasio produktivitas pemanfaatan instalasi produksi	Nilai
2016	Rp. 15.436.872	Rp. 16.698.312	92,45%%	4
2017	Rp. 15.436.872	Rp. 16.698.312	92,45%%	4

Sumber: Data Keuangan PDAM Kab.Gowa (Lampiran 4)

Berdasarkan tabel diatas rasio produktivitas pemanfaatan instalasi produksi sudah sangat baik dapat dilihat dari nilai yang didapatkan pada tahun 2016 dan 2017 yaitu 92,45% dengan nilai 4, hal ini sudah sangat baik hampir mendapat nilai sempurna, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A.Malik Abbas selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal.

e. Tingkat Kehilangan Air

Jumlah m^3 air yang diproduksi adalah jumlah m^3 air yang tercatat dimeter induk yang dipasang pada pipa keluaran baik penampungan air hasil produksi yang akan didistribusikan.

Jumlah m^3 air yang terjual adalah jumlah m^3 air yang terjual yang tercatat dimeter air pelanggan melalui rekening yang di tagihkan.

$$\frac{\text{Jumlah } m^3 \text{ Air yang Didistribusikan} - \text{yang terjual}}{\text{Jumlah } m^3 \text{ yang Didistribusikan}} \times 100\%$$

Tabel 4.6.2.5
Perhitungan dan Nilai Tingkat Kehilangan Air

Tahun	Jumlah m^3 air yang didistribusikan yang terjual	Jumlah m^3 yang didistribusikan	Rasio tingkat kehilangan air	Nilai
2016	Rp. 2.543.766	Rp. 8.519.637	29,86%%	3
2017	Rp. 2.812.104	Rp. 9.269.363	30,34%%	2

Sumber: Data Keuangan PDAM Kab.Gowa (Lampiran 4)

Berdasarkan tabel diatas rasio tingkat kehilangan air masih dikategorikan cukup pada tahun 2016 dengan rasio 29,86% dan mendapat nilai 3, dan meningkat pada tahun 2017 dengan rasio 30,34 dan mendapat nilai 2. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah m^3 yang didistribusikan masih jauh lebih banyak dari jumlah air yang didistribusikan yang terjual, maka dengan demikian PDAM masih harus meningkatkan penjualan air agar dapat seimbang dengan jumlah yang

didistribusikan, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A.Malik Abbas selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal.

f. Peneraan Meter Air

Meter air adalah alat ukur yang harus baik dan akurat. Jika meter air tidak baik atau tidak akurat maka angka yang dicatat menjadi tidak benar untuk menjamin kebenaran data yang ditunjukkan oleh meter air, maka harus dipastikan bahwa selama terpasang meter air tersebut dalam kondisi baik dan akurat. Caranya adalah dengan mengadakan pemeliharaan seluruh meter yang dipasang dan ditera secara periodik dan menggantinya bila rusak atau bila sudah tiba waktu penggantian. Umur teknis meter air diperkirakan kurang lebih 5 tahun, sehingga meter air terpasang harus diganti setiap 5 tahun sekali.

$$\frac{\text{Jumlah pelanggan yang meter airnya ditera}}{\text{Jumlah seluruh pelanggan}} \times 100$$

Tabel 4.6.2.6
Perhitungan dan Nilai Peneraan Meter Air

Tahun	Jumlah pelanggan yang meter airnya ditera	Jumlah seluruh pelanggan	Rasio peneraan meter air	Nilai
2016	2.210	32.874	6,72%	1
2017	793	35.587	2,23%	1

Sumber: Data Keuangan PDAM Kab.Gowa (Lampiran 4)

Berdasarkan tabel diatas rasio peneraan meter air dikategorikan kurang dengan rasio 6,72% pada tahun 2016 dan 2,23% pada tahun 2017 dan hanya mendapat nilai 1. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pelanggan yang meter airnya ditera masih jauh dari jumlah seluruh pelanggan. Hal ini disebabkan karna jumlah SDM masih minim sehingga membatasi peneraan meter air pelanggan, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A.Malik Abbas selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal.

g. Kecepatan penyambungan baru

Penyambungan baru berarti penambahan pelanggan yang selanjutnya menjadi sumber penerimaan dan memperluas cakupan pelayanan PDAM.

Tabel 4.6.2.7
Nilai Kecepatan Penyambungan Baru

Tahun	Lamanya waktu	Nilai
2016	Kurang lebih 6 hari kerja	2
2017	Kurang lebih 6 hari kerja	2

Sumber: Data Keuangan PDAM Kab.Gowa (Lampiran 4)

Berdasarkan tabel diatas nilai kecepatan penyambungan baru dikategorikan sangat baik dengan waktu kurang lebih 6 hari kerja penyambungan air sudah dapat digunakan/terpasang bagi pelanggan baru, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A.Malik Abbas selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal.

h. Kemampuan Penanganan Pengaduan Rata-rata Per-Bulan

Kemampuan PDAM dalam menyelesaikan pengaduan-pengaduan dari pelanggan.

$$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan}} \times 100\%$$

Tabel 4.6.2.8
Perhitungan dan Nilai Kemampuan Penanganan Pengaduan Rata-rata Per-Bulan

Tahun	Jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani	Jumlah seluruh pengaduan	Rasio kemampuan penanganan pengaduan rata-rata perbulan	Nilai
2016	355	355	100%	2
2017	574	574	100%	2

Sumber: Data Keuangan PDAM Kab.Gowa (Lampiran 4)

Berdasarkan tabel diatas rasio kemampuan penanganan pengaduan rata-rata perbulan dikategorikan sangat baik dengan rasio 100% dan mendapat nilai 2. Hal ini dikarenakan jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani seimbang dengan

jumlah seluruh pengaduan, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A.Malik Abbas selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal.

i. Kemudahan Pelayanan

Tersedianya sarana penunjang dalam memberikan kemudahan pelayanan baik untuk urusan administrasi maupun pengaduan. Dalam hal ini yang dimaksud tersedianya sarana penunjang yakni tersedianya *service point* diluar kantor pusat.

Tabel 4.6.2.9
Nilai Kemudahan Pelayanan

Tahun	Tersedianya pelayanan/ <i>service point</i>	Nilai
2016	Tersedia	2
2017	Tersedia	2

Sumber: Data Keuangan PDAM Kab.Gowa (Lampiran 4)

Berdasarkan tabel diatas nilai kemudahan pelayanan dikategorikan sangat bagus dengan mendapat nilai 2 yang berarti layanan pengaduan rata-rata bagi pelanggan tersedia, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A.Malik Abbas selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal.

j. Rasio Karyawan Per-1000 Pelanggan

Pada dasarnya tidak ada suatu rasio tertentu yang dapat dipakai sebagai standar bagi semua PDAM, karna jumlah pegawai bukan hanya tergantung pada jumlah pelanggan tetapi lebih banyak ditentukan oleh system yang ada, luas daerah, jumlah kota dan lokasi yang dilayani, jumlah instalasi produksi yang dikelola, sistema administrasi yang dipakai, struktur organisasi dan panjang jaringan pipa yang dikelola.

Penilaian kinerja atas indikator rasio karyawan terhadap pelanggan dibedakan antara karyawan PDAM sendiri atau sebagian pekerjaan di kontrakkan kepada pihak ketiga.

$$\frac{\text{Jumlah karyawan}}{\text{Jumlah pelanggan}} \times 1000$$

Tabel 4.6.2.10
Perhitungan dan Nilai Karyawan Per-1000 Pelanggan

Tahun	Jumlah karyawan	Jumlah pelanggan	Rasio karyawan per-1000 pelanggan	Nilai
2016	202	32.874	6,14%	5
2017	217	35.587	6,10%	5

Sumber: Data Keuangan PDAM Kab.Gowa (Lampiran 4)

Berdasarkan tabel diatas rasio karyawan per-1000 pelanggan dikategorikan sangat baik. Dengan rasio 6,14 pada tahun 2016 dan 6,10 pada tahun 2017 yang berarti rasio tersebut kurang dari angka minimal rasio karyawan per-1000 pelanggan. Hal ini berarti jumlah karyawan dan jumlah pelanggan hampir seimbang, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A.Malik Abbas selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal.

Berdasarkan perhitungan 10 indikator Aspek Operasional perusahaan pada tahun 2016 mendapat nilai 22,13% sedangkan 2017 mendapat nilai 21,28%, jika dijumlahkan mendapat nilai 43,41% dapat dikategorikan nilai tingkat kinerja PDAM pada Aspek Operasional Kurang.

4.6.3 Perhitungan dan Hasil Perhitungan Kinerja Aspek Administrasi Tahun 2016-2017

a. Rencana Jangka Panjang

Rencana jangka panjang (*Corporate Plan*) adalah rencana strategis yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai perusahaan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun mendatang.

Tabel 4.6.3.1
Nilai Rencana Jangka Panjang

Tahun	Pelaksanaan	Nilai
2016	Tidak memiliki	1
2017	Tidak memiliki	1

Sumber: Data Keuangan PDAM Kab.Gowa (Lampiran 5)

Berdasarkan tabel diatas nilai rencana jangka panjang dikategorikan kurang, karna PDAM masih belum memiliki nilai rencana jangka panjang, hal ini disebabkan karna PDAM belum memiliki rencana jangka panjang, dan hal ini harus di perhatikan oleh perusahaan, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A.Malik Abbas selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal.

b. Rencana Organisasi dan Uraian Tugas

Rencana organisasi dan uraian tugas ini menggambarkan adanya pengelompokkan dari berbagai kegiatan yang perlu dilakukan secara terarah dan dipimpin untuk mencapai tujuan perusahaan. Rencana organisasi mencakup urutan pembagian pekerjaan, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing tingkatan organisasi dan setiap karyawan harus mempunyai uraian tugas yang jelas.

Tabel 4.6.3.2
Nilai Rencana Organisasi dan Uraian Tugas

Tahun	Pelaksanaan	Nilai
2016	Memiliki, belum dipedomani	2
2017	Sepenuhnya dipedomani	4

Sumber: Data Keuangan PDAM Kab.Gowa (Lampiran 5)

Berdasarkan tabel diatas nilai rencana organisasi dan uraian tugas pada TAHUN 2016 masih dikategorikan kurang karna pelaksanaannya hanya memiliki, belum dipedomani dan mendapat nilai 2, sedangkan pada tahun 2017 pelaksanaannya sepenuhnya dipedomani dan mendapat nilai 4 yang dikategorikan sangat baik, hal ini berarti pada tahun 2017 pelaksanaan rencana dan uraian tugas sudah sepenuhnya dipenuhi oleh perusahaan, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A.Malik Abbas selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal.

c. Prosedur Operasi Standar

Bisa juga disebut sebagai standar operasi dan prosedur (SOP). SOP terdiri dari pedoman dibidang teknik yang meliputi produksi, distribusi, peneraan meter, pemeriksaan air, penyambungan baru, penggantian meter, pemeliharaan genset, dan lain-lain, yang bukan hanya tahapannya tetapi menjelaskan juga teknis pelaksanaannya dan dibidang administrasi meliputi system akuntansi, sistem penggajian, sistem penilaian pegawai, sistem penilaian pelaporan, sistem pemeriksaan, system penganggaran dan lain-lain.

Tabel 4.6.3.3
Nilai Prosedur Operasi Standar

Tahun	Pelaksanaan	Nilai
2016	Tidak Memiliki	1
2017	Dipedomani Sebagian	3

Sumber: Data Keuangan PDAM Kab.Gowa (Lampiran 5)

Berdasarkan tabel diatas nilai prosedur operasi standar pada tahun 2016 dikategorikan kurang karna pelaksanaannya masih belum memiliki dan hanya mendapat nilai 1, sedangkan pada tahun 2017 pelaksanaannya sudah dipedomani sebagian dengan nilai 3 yang dikategorikan cukup. Hal ini berarti prosedur standar operasi perusahaan masih harus ditingkatkan lagi, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A.Malik Abbas selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal.

d. Gambar Nyata Laksana (*As Built Drawing*)

Gambar nyata laksana adalah gambar diatas kertas yang memvisualisasikan setiap bangunan dan peralatan yang digunakan dalam sistem penyediaan air bersih, mulai dari unit produksi, distribusi, peralatan-peralatan, bangunan dan lain-lain.

Tabel 4.6.3.4
Nilai Gambar Nyata Laksana

Tahun	Pelaksanaan	Nilai
2016	Dipedomani Sebagian	3
2017	Memiliki, Dipedomani Sebagian	3

Sumber: Data Keuangan PDAM Kab.Gowa (Lampiran 5)

Berdasarkan tabel diatas nilai gambar nyata laksana pada tahun 2016 dan 2017 dikategorikan cukup karna pelaksanaannya sudah dipedomani sebagian, hal ini hanya perlu ditingkatkan lagi agar mendapat nilai yang maksimal, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A.Malik Abbas selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal.

e. Pedoman Penilaian Kerja Karyawan

Dalam rangka produktifitas tenaga kerja perlu adanya suatu penilaian yang *fair* Atas kinerja karyawan. Penilaian dimaksud meliputi kedisiplinan, kemampuan prestasi dll. Yang dijadikan acuan dalam penentuan karir, gaji, kompensasi

lainnya termasuk keikutsertaan dalam program peningkatan sumber daya manusia. Untuk itu perlu suatu adanya pedoman penilaian kerja karyawan yang dapat dijadikan suatu alat untuk menilai prestasi kerja karyawan perusahaan.

Tabel 4.6.3.5
Nilai Pedoman Penilaian Kerja Karyawan

Tahun	Pelaksanaan	Nilai
2016	Tidak Memiliki	1
2017	Tidak Memiliki	1

Sumber: Data Keuangan PDAM Kab.Gowa (Lampiran 5)

Berdasarkan tabel diatas nilai pedoman penilaian kerja karyawan dikategorikan kurang karna perusahaan belum memiliki penilaian kerja karyawan. Hal ini harus ditindak lanjuti oleh perusahaan agar dapat mengevaluasi kerja karyawan, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A.Malik Abbas selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal.

f. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang (*Corporate Plan*) yang ditunaikan secara tahunan yaitu rencana kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam nilai uang, meliputi taksiran pendapat, biaya serta penerimaan dan pengeluaran uang untuk aktifitas operasional maupun investasi.

Tabel 4.6.3.6
Nilai Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)

Tahun	Pelaksanaan	Nilai
2016	Sepenuhnya Dipedomani	4
2017	Dipedomani Sebagian	3

Sumber: Data Keuangan PDAM Kab.Gowa (Lampiran 5)

Berdasarkan tabel diatas nilai rencana kerjaan anggaran perusahaan (RKAP) dikategorikan sangat baik pada tahun 2016 karna pelaksanaannya sepenuhnya dipedomani, sedangkan pada tahun 2017 menurun menjadi cukup karna pelaksanaannya dipedomani sebagian, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A.Malik Abbas selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal.

g. Tetib Laporan Internal

Laporan internal merupakan media penyampaian informasi bagi manajemen terhadap informasi perusahaan, oleh karnanya harus memenuhi kegunaannya secara efektif untuk kepentingan analisa pengendalian dan pengambilan keputusan. Laporan internal meliputi laporan harian, bulanan dan tahunan dimana harus disajikan tepat pada waktu yang diperlukan atau segera setelah berakhirnya periode pelaporan karna terdapat penundaan tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

Tabel 4.6.3.7
Nilai Tertib Laporan Internal

Tahun	Tertib Laporan	Nilai
2016	Tepat Waktu	2
2017	Tepat Waktu	2

Sumber: Data Keuangan PDAM Kab.Gowa (Lampiran 5)

Berdasarkan tabel diatas nilai tertib laporan internal dikategorikan sangat baik dengan nilai 2 yang berarti pelaporan internal perusahaan tepat waktu, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A.Malik Abbas selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal.

h. Tertib Laporan Eksternal

Laporan eksternal merupakan media penyampaian informasi manajemen kepada pihak luar sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan eksternal tersebut antara lain laporan keuangan tahunan yang meliputi neraca, laporan rugi-laba, laporan arus kas kepada badan pengawas, laporan untuk keperluan pajak dll. Laporan ini harus disajikan tepat waktu yang diperlukan atau segera setelah berakhirnya periode pelaporan, karena jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

Tabel 4.6.3.8
Nilai Tertib Laporan Eksternal

Tahun	Tertib Laporan	Nilai
2016	Tepat Waktu	2
2017	Tepat Waktu	2

Sumber: Data Keuangan PDAM Kab.Gowa (Lampiran 5)

Berdasarkan tabel diatas nilai tertib laporan eksternal dikategorikan sangat baik dengan nilai 2 yang berarti pelaporan eksternal perusahaan tepat waktu, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A.Malik Abbas selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal.

i. Opini Auditor Indepen

Untuk setiap tahun buku laporan keuangan yang disajikan manajemen harus diperiksa kewajarannya oleh auditor independen. Opini atau pendapat auditor independen ini mencerminkan tingkat keyaninan yang memadai bahwa apakah laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material.

Tabel 4.6.3.9
Nilai Opini Auditor Independen

Tahun	Opini	Nilai
2016	Diaudit, Unqualified	4
2017	Diaudit, Unqualified	4

Sumber: Data Keuangan PDAM Kab.Gowa (Lampiran 5)

Berdasarkan tabel diatas nilai opini auditor independen dikategorikan sangat baik dengan nilai 4 yang opini auditor pada perusahaan tidak memenuhi syarat, hal ini dikarenakan masih banyak yang harus ditingkatkan lagi oleh perusahaan dari segi aspek keuangan, operasional dan administrasinya sendiri, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A.Malik Abbas selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal.

j. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun Terakhir

Rekomendasi dari instansi pemeriksaan ini merupakan saran yang harus dilakukan yang merupakan hasil temuan pemeriksa berupa penyimpangan dan kondisi yang tidak lazim dari ketentuan yang baku yang menyangkut operasi dan keuangan.

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi pemeriksa terhadap objek yang diperiksa seyogyanya ditindaklanjuti dengan melakukan dengan langkah-langkah yang kongkrit sebagai upaya perbaikan yang dilakukan.

Indikator ini ingin melihat sejauh mana efektifitas perbaikan terhadap praktek-praktek yang tidak lazim dari ketentuan yang tidak baku yang menyangkut operasional dan keuangan objek yang diperiksa.

Tabel 4.6.3.10
Nilai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun Terakhir

Tahun	Tindak Lanjut	Nilai
2016	Ditindaklanjuti, Sebagian Selesai	2
2017	Ditindaklanjuti, Sebagian Selesai	2

Sumber: Data Keuangan PDAM Kab.Gowa (Lampiran 5)

Berdasarkan tabel diatas nilai tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun terakhir perusahaan dikategorikan kurang hal ini disebabkan karna tindak lanjut yang masih sebagian. Hal ini berarti ada beberapa hal yang masih harus ditindak lanjuti oleh perusahaan agar tidak mendapat temuan-temuan yang dapat merugikan perusahaan, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A.Malik Abbas selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal.

Berdasarkan 10 indikator Aspek Administrasi diatas pada tahun 2016 mendapat nilai 9,17% sedangkan pada tahun 2017 mendapat nilai 10,42%, jika dijumlahkan mendapat nilai 19,59% dapat dikategorikan tingkat penilaian kinerja PDAM pada Aspek Administrasi Tidak Buruk.

4.6.4 Penentuan Nilai Kinerja Aspek Keuangan, Aspek Operasional serta Aspek Administrasi Perusahaan.

Dari perhitungan nilai kinerja perusahaan berdasarkan SK Mendagri No. 47 tahun 1999 diperoleh hasil penilaian kinerja masing-masing aspek seperti yang ditunjukkan dalam tabel 3.5.

Tabel 4.6.4.1
Hasil Analisis Penilaian Kinerja Aspek Keuangan PDAM

No	Keterangan	Nilai	
		2016	2017
1	Rasio laba terhadap aktiva produktif	2	2
2	Rasio laba terhadap penjualan	2	2
3	Rasio aktiva lancar terhadap utang lancar	1	1
4	Rasio utang jangka panjang terhadap total utang	5	5
5	Rasio total aktiva terhadap total utang	5	5
6	Rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi	2	2
7	Rasio laba operasi sebelum biaya penyusutan terhadap angsuran pokok dan bunga jatuh tempo	5	5
8	Rasio aktiva produktif terhadap penjualan air	5	4
9	Jangka waktu penagihan piutang	5	4
10	Efektifitas penagihan	4	4
	Total	36	34

Sumber: Data Keuangan PDAM Kab.Gowa (Lampiran 1)

Tabel 4.6.4.2
Hasil Analisis Penilaian Kinerja Aspek Operasional PDAM

No	Keterangan	Nilai	
		2016	2017
1	Cakupan pelayanan	3	3
2	Kualitas distribusi	2	2
3	Kontinuitas air distribusi	1	1
4	Produktifitas pemanfaatan instalasi produksi	4	4
5	Tingkat kehilangan air	3	2
6	Peneraan meter air	1	1
7	Kecepatan penyambungan baru	2	2
8	Kemampuan penanganan pengaduan rata-rata perbulan	2	2
9	Kemudahan pelayanan	2	2
10	Rasio keryawan per-1000 karyawan	5	2
	Total	25	21

Sumber: Data Operasional PDAM Kab.Gowa (Lampiran 5)

Tabel 4.6.4.3
Hasil Analisis Penilaian Kinerja Aspek Administrasi PDAM

No	Keterangan	Nilai	
		2016	2017
1	Rencana jangka panjang	1	1
2	Rencana organisasi dan uraian tugas	2	4
3	Prosedur operasi standar	1	3
4	Gambar nyata laksana	3	3
5	Pedoman penilaian kerja karyawan	1	1
6	Rencana kerja dan anggaran perusahaan	4	3
7	Tertib laporan internal	2	2
8	Tertib laporan eksternal	2	2
9	Opini auditor independen	4	4
10	Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun terakhir	2	2
	Total	22	24

Sumber: Data Administrasi PDAM Kab.Gowa (Lampiran 5)

Sistem penilaian kinerja perusahaan yang didasarkan pada SK Mendagri No. 47 tahun 1999 ditentukan berdasarkan perhitungan total nilai kinerja aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi.

Penilaian kinerja PDAM tahun 2016-2017 adalah :

$$\text{Aspek keuangan} = \frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh}}{\text{Maksimum nilai}} \times \text{bobot}$$

$$\text{Aspek operasional} = \frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh}}{\text{Maksimum nilai}} \times \text{bobot}$$

$$\text{Aspek administrasi} = \frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh}}{\text{Maksimum nilai}} \times \text{bobot}$$

Tabel 4.6.4.4
Hasil Penilaian Kinerja dan Nilai Kinerja

Tahun	Hasil Penilaian Kinerja			Total Jumlah Penilaian Kinerja	Nilai Kinerja
	Keuangan	Operasional	Administrasi		
2016	27,75%	22,13%	9,17%	59,05%	Cukup
2017	28,50%	21,28%	10,42%	60,2%	Baik

Sumber : Data Keuangan PDAM Kab.Gowa (Lampiran 3,4,5)

Setelah diketahui nilai kinerja perusahaan, nilai kinerja yang diperoleh klasifikasi dengan menggunakan klasifikasi kinerja perusahaan.

Total dari aspek keuangan, operasional dan administrasi jika nilai yang diperusahaan maksimum pada tahun 2016 total jumlah penilaian kinerja PDAM 59,05% yang dikategorikan "Cukup" dan pada tahun 2017 total jumlah penilaian kinerja PDAM 60,2% yang dikategorikan "baik". Hal ini berarti kinerja PDAM hasil memerlukan beberapa peningkatan kinerja lagi dari Aspek Keuangan, Operasional, dan Administrasi karena ketiga aspek ini sangat penting bagi penilaian kinerja perusahaan, aspek keuangan tidak akan maksimal jika aspek operasional perusahaan tidak maksimal, dan aspek operasional tidak akan maksimal jika aspek administrasi tidak maksimal pula. Maka dari itu pentatatan ketiga aspek ini harus tertib dan tepat waktu untuk meningkatkan kinerja tahun-tahun berikutnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan secara umum bahwa Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gowa berdasarkan Undang-undang No.47 tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum pada tahun 2016 nilai kinerjanya 59,05% berarti kinerja PDAM cukup dan pada tahun 2017 nilai kinerjanya 60,2% berarti kinerja PDAM baik.

Kinerja PDAM Tirta Jenneberang masih belum menunjukkan kinerja yang baik terutama disebabkan oleh kondisi keuangan perusahaan yang masih mengalami kerugian, masih rendahnya cakupan pelayanan, kontinuitas air yang masih kurang dari 24 jam, belum dilakukannya peneraan meter air pelanggan, perusahaan belum menyusun rencana jangka panjang, serta masih terdapat hasil audit tahun terakhir yang masih harus ditindaklanjuti.

PDAM Tirta Jenneberang masih berpeluan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan efisiensi biaya produksi air sehingga resiko biaya operasi terhdap pendapatan operasi dpaat turun dan agar dilakukan penekanan pada biaya-biaya umum dan administrasi serta disiplin terhadap anggaran biaya (RKAP).

2. Meningkatkan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat dengan cara memperluas dan menambah jaringan distribusi serta meningkatkan pemasangan sambungan pelanggan baru.
3. Mengupayakan menekan tingkat kehilangan air maksimal 20% dengan melakukan perbaikan jaringan distribusi dan melakukan peneraan penggantian *water* meter yang rusak.
4. Menyusun rencana jangka panjang lima tahun.
5. Menyusun gambar nyata laksana untuk seluruh sistem distribusi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perusahaan diharapkan lebih memperhatikan aspek keuangan karena perbandingan antara hasil maksimum dengan hasil pencapaian kinerja sangat jauh. Selama ini PDAM belum dapat meningkatkan variabel pendapatannya yaitu jumlah pelanggan yang masih sedikit, jenis pelanggan kebanyakan sambungan rumah jadi masih subsidi dan tarif air masih dibawah harga produksi. Sehingga PDAM dari tahun 2016-2017 masih mendapatkan sedikit keuntungan yaitu 1,39%.
2. Perusahaan sebaiknya lebih meningkatkan pendapatan operasi agar pendapatan operasi dapat menutup semua biaya operasi sehingga dapat menghasilkan laba yang lebih maksimal.
3. Perusahaan perlu meningkatkan pelayanan terhadap para pelanggan dengan meningkatkan produktivitas pemanfaatan instalasi produksi

sehingga dapat menambah jumlah air. Dengan demikian akan menambah jumlah pelanggan yang dapat memperoleh pelayanan air bersih selama 24 jam.

4. Perusahaan perlu melakukan pemantauan dibagian teknik dalam memeriksa kebocoran pipa untuk meminimalisir tingkat kehilangan air.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun, N. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pada PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa : Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Aji. D.R. 2012. Penilaian Kinerja Keuangan Pdam Kota Salatiga Berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 Periode 2006-2010. Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Ayuningtyas, Nordiawan, 2010, “Akuntansi Sektor Publik Edisi kedua.Jakarta” : Penerbit Salemba Empat.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: Deputi Bidang Akuntan Negara. 2016. Buku Pedoman Evaluasi Kinerja PDAM.
- Brown, P. (2011). International financial reporting standards : what are the benefit? *Accounting and business Research*, 41(3), 269-285.
- Maria M, Elvy “Akuntansi Dasar (untuk pemula)” 2011: penerbit Erlangga.
- Fahmi, I. 2012. Analisis Kinerja Keuangan. Bandung: Alfabeta. Hery. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hery. 2016. Financial Ratio For Business. Jakarta: PT Grasindo.
- Faisal, S. 2012, *Format-format Penelitian Sosial : Dasar-dasar dan Aplikasi*. Rajawali Press. Jakarta.
- Hayn, C. (1995). The information content of losses. *Journal of Accounting and Economics*, 20(2), 125-153.
- Herni, dan Yulius K. Susanto. 2008. Pengaruh Struktur Kepemilikan Publik, Praktik Pengelolaan Perusahaan, Jenis Industri, Ukuran Perusahaan Profitabilitas dan

Risiko Keuangan Terhadap Tindakan Perataan Laba (Studi Empiris Pada Industri Yang Listing di Bursa Efek Jakarta). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, vol 23. No.3, 2008, hal : 302-314.

Hery, "Akuntansi Aset, Liabilitas, dan Ekuitas" 2014. Jakarta : PT. Grasindo.

Huda, A. Z. 2013. Analisis Kinerja Dengan Pendekatan Balance Scorecard: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Peasnel, K. V., Pope, P.F., & Young, S. (2005). Board monitoring and earning management : do outside directors influence abnormal accruals? *Journal of Business Finance & Accounting*, 32(7-8), 1311-1346.

Prasetyani, N. 2009. Analisis Kinerja Pelayanan Publik Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kabupaten Demak: Tesis Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Siregar, S. V., dan S Utama. 2006. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earning Management). *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol, 9 No. 2, September, 2006, hal : 307-326.

Sulistyanto, H. Sri, dan Haris Wibisono. 2003. Good Corporate Governance : Berhasilkah diterapkan di Indonesia.

<http://researchengines.com/hsulistyanto3.html>.

Warren Reeve Fess, "Accounting Principles", 21st edition, 2009, South-Western.

Wibowo dan Abubakar Arif, "Akuntansi Keuangan Dasar 1", 2008, Grasindo.